

PENGANTAR EKONOMI REGIONAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH

PENULIS :

- Iwan Harsono
- Unang Atmaja
- Banatul Hayati
- Emi Salmah



PENGANTAR EKONOMI REGIONAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH

**Iwan Harsono
Unang Atmaja
Banatul Hayati
Emi Salmah**



GET PRESS INDONESIA

PENGANTAR EKONOMI REGIONAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Penulis :

Iwan Harsono
Unang Atmaja
Banatul Hayati
Emi Salmah

ISBN : 978-634-255-732-7

Editor : Ariyanto.,M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni., S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, September 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Pengantar Ekonomi Regional Dan Pembangunan Wilayah ini.

Buku Ini Membahas : Konsep Dasar Ekonomi Regional dan Wilayah, Teori Lokasi, Aglomerasi, dan Perwilayahan, Urbanisasi, Migrasi, dan Dinamika Wilayah, Keruangan Wilayah, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Mataram, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI REGIONAL DAN WILAYAH	1
1.1 Pengertian Ekonomi Regional dan Konsep Wilayah	1
1.1.1 Pengertian Ekonomi Regional	2
1.1.2 Konsep Wilayah dalam Ekonomi Regional	3
1.1.3 Hubungan Ekonomi Regional dengan Pembangunan Wilayah	4
1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Wilayah	5
1.1.5 Ketimpangan Antarwilayah	7
1.1.6 Pusat Pertumbuhan dan Polarisasi Ekonomi ...	7
1.1.7 Infrastruktur dalam Pembangunan Wilayah ...	8
1.1.8 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah	9
1.2 Ruang Lingkup dan Tujuan Ekonomi Regional	9
1.2.1 Ruang Lingkup Ekonomi Regional	10
1.2.2 Tujuan Ekonomi Regional	11
1.3 Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Wilayah	12
1.3.1 Teori Lokasi dan Pertumbuhan Wilayah	12
1.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik	13
1.3.3 Teori Pertumbuhan Neoklasik	14
1.3.4 Teori Basis Ekonomi	15
1.3.5 Teori Kutub Pertumbuhan (<i>Growth Pole Theory</i>)	16
1.3.6 Teori Kausalitas Kumulatif	16
1.3.7 Teori Pembangunan Infrastruktur	17
1.3.8 Teori Pembangunan Berbasis Potensi Lokal	18
1.3.9 Teori Pembangunan Partisipatif	18
1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional	19

1.4.1 Sumber Daya Alam sebagai Faktor Pertumbuhan Wilayah	20
1.4.2 Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	21
1.4.3 Kualitas Sumber Daya Manusia	21
1.4.4 Investasi dan Pembentukan Modal	22
1.4.5 Teknologi dan Inovasi	23
1.4.6 Kebijakan Pemerintah dan Kelembagaan	24
1.4.7 Urbanisasi dan Konsentrasi Aktivitas Ekonomi	25
1.4.8 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah	26
DAFTAR PUSTAKA	27
BAB 2	29
TEORI LOKASI, AGLOMERASI, DAN PERWILAYAHAN	29
2.1 Teori Lokasi Klasik	29
2.1.1 Model Cincin von Thünen: Ketika Jarak Menentukan Pilihan Tanam	29
2.1.2 Segitiga Lokasi Weber: Mencari Titik Ongkos Termurah	30
2.1.3 Teori Tempat Sentral Christaller: Hierarki di Balik Sebaran Kota	32
2.1.4 Penyempurnaan Lösch dan Sintesis Kritis	34
2.2 Teori dan Konsep Aglomerasi	34
2.2.1 Mengapa Kegiatan Ekonomi Suka Berkumpul	34
2.2.2 Eksternalitas Marshallian: Tiga Sumber Keuntungan Berkerumun	35
2.2.3 <i>New Economic Geography</i> : Skala Ekonomi Bertemu Biaya Transportasi	37
2.2.4 Kluster Agribisnis: Aglomerasi dalam Rantai Pasok Pertanian	38
2.2.5 Dua Sisi Mata Uang: Manfaat Aglomerasi dan Risiko Kesenjangan	40
2.3 Teori Perwilayahan (<i>Regionalization</i>)	40
2.3.1 Wilayah Formal dan Wilayah Fungsional	40
2.3.2 Teori Kutub Pertumbuhan Perroux	41
2.3.3 Hierarki Wilayah dan Keterkaitan Desa-Kota	43
2.3.4 Kerangka Perencanaan Wilayah menurut Glasson	43

2.3.5 Aplikasi pada Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi Pangan	44
2.4 Integrasi Teori dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Agribisnis	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
BAB 3 URBANISASI, MIGRASI, DAN DINAMIKA	
WILAYAH	49
3.1 Konsep Dasar Urbanisasi dan Migrasi	50
3.1.1 Urbanisasi: Definisi dan Karakteristik	50
3.1.2 Migrasi: Definisi dan Tipologi	51
3.1.3 Teori Migrasi dalam Perspektif Ekonomi Regional	51
3.1.4 Relevansi Teori dalam Ekonomi Regional Modern	56
3.2 Keterkaitan Urban Bias dengan Urbanisasi dan Migrasi Desa-Kota.....	56
3.2.1 Urban Bias sebagai penyebab Migrasi Desa-kota.....	57
3.2.2 Dampak Urban Bias Terhadap Urbanisasi Dan Migrasi	57
3.2.3 Urban Bias Menurut Perspektif Ekonomi Regional	58
3.3 Urbanisasi dan Dinamika Wilayah	58
3.3.1 Redistribusi Penduduk dan Tenaga Kerja	58
3.3.2 Pembentukan Aglomerasi Ekonomi.....	58
3.3.4 Sektor Informal Perkotaan dan urban poverty	59
3.4 Implikasi Kebijakan	60
3.5 Kesimpulan.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
BAB 4 KERUANGAN WILAYAH, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	63
4.1 Konsep Keruangan Wilayah	63
4.1.1 Pengertian Ruang	63
4.1.2 Konsep Keruangan.....	64
4.1.3 Konsep Wilayah.....	66
4.1.4 Klasifikasi Wilayah	66
4.1.5 Interaksi Antarwilayah	67

4.1.6 Analisis Keruangan dalam Pembangunan	68
4.1.7 Contoh Penerapan Konsep Keruangan dan Wilayah di Indonesia	68
4.2 Sumber Daya Alam	69
4.2.1 Pengertian Sumber Daya Alam	69
4.2.2 Klasifikasi Sumber Daya Alam.....	70
4.2.3 Potensi Sumber Daya Alam Indonesia.....	72
4.2.4 Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	73
4.2.5 Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam	74
4.2.6 Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	75
4.3 Lingkungan Hidup	76
4.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup.....	76
4.3.3 Ekosistem, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan.....	78
4.3.4 Permasalahan Lingkungan Hidup.....	79
4.3.5 Pelestarian Lingkungan Hidup.....	82
4.3.6 Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	83
4.4 Studi Kasus Di Indonesia	84
4.4.1 Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Tata Guna Lahan di Indonesia.....	84
4.4.2 Deforestasi dan Pengelolaan Hutan di Indonesia	85
4.4.3 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	85
4.4.4 Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan	86
4.4.5 Perubahan Iklim dan Bencana Lingkungan di Indonesia	87
4.4.6 Studi Kasus Pengelolaan Wilayah Berkelanjutan di Indonesia.....	88
4.5 Penutup.....	89
4.5.1 Rangkuman.....	89
4.5.2 Refleksi Pembelajaran.....	90
4.5.3 Kesimpulan	91
4.5.4 Rekomendasi	91
4.5.5 Penutup	92

DAFTAR PUSTAKA.....94

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jalan sebagai Infrastruktur yang Mempengaruhi Konektivitas	6
Gambar 2.1. Model Cincin Konsentris Von Thünen	30
Gambar 2.2. Segitiga Lokasi Weber	32
Gambar 2.3. Hierarki Tempat Sentral Christaller	33
Gambar 2.4. Tiga Sumber Eksternalitas Marshallian	36
Gambar 2.5. Pola Inti-Pinggiran dalam New Economic Geography	38
Gambar 2.6. Keterkaitan Industri Pendorong dalam Teori Kutub Pertumbuhan Perroux	42
Gambar 3.1. Model Migrasi Harris- Todaro	54

BAB 1

KONSEP DASAR EKONOMI REGIONAL DAN WILAYAH

1.1 Pengertian Ekonomi Regional dan Konsep Wilayah

Ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas ekonomi berdasarkan dimensi ruang atau wilayah tertentu. Kajian ekonomi regional berfokus pada bagaimana sumber daya, penduduk, kegiatan produksi, distribusi, investasi, dan pembangunan tersebar pada berbagai wilayah serta bagaimana interaksi antardaerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbedaan karakteristik geografis, sumber daya alam, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah menyebabkan setiap wilayah memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda. Hoover dan Giarratani (1971) menjelaskan bahwa ekonomi regional mempelajari distribusi aktivitas ekonomi dalam ruang serta hubungan antarwilayah dalam sistem perekonomian.

Perkembangan ekonomi regional tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi daerah secara efektif dan berkelanjutan. Arsyad (2010) menjelaskan bahwa pembangunan wilayah dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antardaerah serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Pendekatan ekonomi regional menjadi penting karena kebijakan pembangunan nasional sering menghasilkan dampak yang berbeda pada setiap wilayah akibat perbedaan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Glasson (1990) menjelaskan bahwa ekonomi regional menjadi alat analisis penting dalam memahami keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan ruang geografis. Wilayah yang

memiliki akses infrastruktur, sumber daya manusia berkualitas, dan konektivitas ekonomi yang baik cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibanding wilayah yang terisolasi. Harsono et al. (2025) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi kewilayahan harus memperhatikan potensi lokal, karakteristik geografis, struktur ekonomi, dan kemampuan masyarakat agar pembangunan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

1.1.1 Pengertian Ekonomi Regional

Ekonomi regional merupakan studi mengenai bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung pada suatu wilayah tertentu serta bagaimana hubungan ekonomi antarwilayah mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Capello (2007) menjelaskan bahwa ekonomi regional mempelajari:

1. Distribusi kegiatan ekonomi dalam ruang.
2. Interaksi ekonomi antarwilayah.
3. Faktor lokasi kegiatan ekonomi.
4. Ketimpangan pembangunan antarwilayah.
5. Pengaruh kebijakan regional terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi regional berkembang karena aktivitas ekonomi tidak tersebar secara merata. Beberapa wilayah berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, dan jasa, sementara wilayah lainnya tertinggal dan bergantung pada sektor primer. Hoover dan Giarratani (1971) menjelaskan bahwa analisis ekonomi regional berusaha memahami mengapa kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada lokasi tertentu dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan wilayah. Kajian ekonomi regional melibatkan berbagai aspek, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Urbanisasi.
3. Infrastruktur.
4. Investasi daerah.
5. Mobilitas tenaga kerja.
6. Pengembangan sektor unggulan.
7. Konektivitas wilayah.

Harsono (2024) menjelaskan bahwa ekonomi regional berperan penting dalam mendukung pembangunan desa dan daerah melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal.

1.1.2 Konsep Wilayah dalam Ekonomi Regional

Wilayah merupakan suatu area geografis yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dari wilayah lainnya. Konsep wilayah dalam ekonomi regional tidak hanya berdasarkan batas administratif, tetapi juga mempertimbangkan kesamaan ekonomi, sosial, budaya, dan fungsional. Glasson (1990) menjelaskan bahwa wilayah dapat dipahami sebagai ruang geografis yang memiliki hubungan internal dan interaksi ekonomi tertentu. Wilayah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena setiap wilayah memiliki:

1. Potensi sumber daya alam berbeda.
2. Struktur ekonomi berbeda.
3. Tingkat infrastruktur berbeda.
4. Jumlah penduduk berbeda.
5. Tingkat teknologi berbeda.

Jenis wilayah dalam kajian ekonomi regional meliputi:

1. Wilayah Formal (Homogen Region)

Wilayah formal merupakan wilayah yang memiliki karakteristik seragam. Karakteristik wilayah formal:

- a. Kesamaan kegiatan ekonomi.
- b. Kesamaan budaya.
- c. Kesamaan kondisi geografis.

Contoh wilayah formal:

- a. Kawasan pertanian.
- b. Kawasan industri.
- c. Kawasan pertambangan.

2. Wilayah Fungsional (Nodal Region)

Wilayah fungsional terbentuk karena adanya hubungan aktivitas ekonomi antar pusat dan daerah pendukung. Ciri wilayah fungsional:

- a. Memiliki pusat pertumbuhan.
- b. Terjadi interaksi ekonomi intensif.
- c. Adanya arus barang, jasa, dan tenaga kerja.

Contoh wilayah fungsional:

- a. Kawasan metropolitan.
- b. Kawasan perdagangan regional.

3. **Wilayah Perencanaan**

Wilayah perencanaan dibentuk untuk kepentingan pembangunan dan administrasi pemerintahan. Kuncoro (2018) menjelaskan bahwa wilayah perencanaan diperlukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah dan terintegrasi.

1.1.3 **Hubungan Ekonomi Regional dengan Pembangunan Wilayah**

Ekonomi regional memiliki hubungan erat dengan pembangunan wilayah karena pembangunan ekonomi berlangsung dalam ruang geografis tertentu. Pembangunan wilayah bertujuan:

Tabel 1.1. Tujuan Pembangunan Wilayah

No	Tujuan	Deskripsi
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pembangunan wilayah diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik.
2	Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah	Upaya pembangunan dilakukan untuk mengurangi perbedaan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial antar daerah.
3	Mengembangkan Potensi Daerah	Pembangunan wilayah bertujuan mengoptimalkan sumber daya alam, manusia, dan potensi lokal yang dimiliki setiap daerah.
4	Memperluas Kesempatan Kerja	Pembangunan wilayah mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran.
5	Memperkuat Struktur Ekonomi Lokal	Pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah dilakukan untuk menciptakan ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Arsyad (2010) menjelaskan bahwa pembangunan wilayah harus memperhatikan potensi ekonomi lokal agar pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan. Harsono et al. (2025) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi wilayah memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pembangunan wilayah yang baik mampu menciptakan:

1. Pertumbuhan ekonomi inklusif.
2. Peningkatan investasi daerah.
3. Peningkatan produktivitas masyarakat.
4. Pemerataan pembangunan.

1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Wilayah

Perkembangan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama perkembangan wilayah meliputi:

1. Sumber Daya Alam

Wilayah dengan sumber daya alam melimpah memiliki potensi pertumbuhan ekonomi lebih besar. Contoh sumber daya:

- a. Pertanian.
- b. Pertambangan.
- c. Perikanan.
- d. Kehutanan.

2. Infrastruktur

Infrastruktur mempengaruhi konektivitas dan efisiensi ekonomi wilayah. Jenis infrastruktur:

- a. Jalan.
- b. Pelabuhan.
- c. Bandara.
- d. Energi listrik.
- e. Telekomunikasi.



Gambar 1.1. Jalan sebagai Infrastruktur yang Mempengaruhi Konektivitas
Sumber: Gramedia

Gramlich (1994) menjelaskan bahwa investasi infrastruktur memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas ekonomi. Harsono et al. (2024) menunjukkan bahwa infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

3. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia menentukan kemampuan wilayah dalam mengembangkan ekonomi modern. Becker (1964) menjelaskan bahwa human capital menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Aspek sumber daya manusia meliputi:

- a. Pendidikan.
- b. Keterampilan.
- c. Kesehatan.
- d. Produktivitas kerja.

4. Teknologi dan Inovasi

Teknologi meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing ekonomi wilayah. Capello (2007) menjelaskan bahwa inovasi regional menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern.

5. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah melalui:

- a. Investasi publik.
- b. Regulasi ekonomi.
- c. Pembangunan infrastruktur.
- d. Pengembangan kawasan industri.

Harsono (2024) menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan hijau dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

1.1.5 Ketimpangan Antarwilayah

Perbedaan perkembangan ekonomi antarwilayah menjadi salah satu isu utama dalam ekonomi regional. Ketimpangan wilayah terjadi ketika suatu daerah berkembang lebih cepat dibanding daerah lainnya. Penyebab ketimpangan wilayah:

1. Konsentrasi investasi.
2. Perbedaan infrastruktur.
3. Perbedaan kualitas SDM.
4. Keterbatasan akses transportasi.
5. Perbedaan sumber daya alam.

Myrdal (1957) menjelaskan bahwa proses pembangunan ekonomi dapat menciptakan efek kumulatif yang memperbesar kesenjangan antarwilayah. Bentuk ketimpangan wilayah meliputi:

1. Ketimpangan pendapatan.
2. Ketimpangan infrastruktur.
3. Ketimpangan akses pendidikan.
4. Ketimpangan layanan kesehatan.

1.1.6 Pusat Pertumbuhan dan Polarisasi Ekonomi

Pusat pertumbuhan merupakan wilayah yang mengalami perkembangan ekonomi lebih cepat dibanding wilayah lainnya. Konsep pusat pertumbuhan menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu karena:

1. Infrastruktur lebih baik.
2. Konsentrasi industri.
3. Akses pasar luas.
4. Ketersediaan tenaga kerja.

Hirschman (1958) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi sering berlangsung tidak seimbang karena investasi lebih terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu. Dampak pusat pertumbuhan:

1. Dampak Positif

- a. Meningkatkan investasi.
- b. Membuka lapangan kerja.
- c. Mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2. Dampak Negatif

- a. Urbanisasi berlebihan.
- b. Ketimpangan wilayah.
- c. Konsentrasi pendapatan.

North (1955) menjelaskan bahwa pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh sektor basis yang mampu menghasilkan ekspor keluar wilayah. Harsono et al. (2023) menunjukkan bahwa sektor unggulan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

1.1.7 Infrastruktur dalam Pembangunan Wilayah

Infrastruktur menjadi komponen penting dalam ekonomi regional karena mempengaruhi mobilitas ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Jenis infrastruktur utama:

1. Transportasi.
2. Energi.
3. Telekomunikasi.
4. Infrastruktur digital.
5. Infrastruktur sosial.

Gramlich (1994) menjelaskan bahwa investasi infrastruktur mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan efisiensi distribusi barang dan jasa. Afriyana et al. (2023)

menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

1.1.8 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat meliputi:

1. Perencanaan pembangunan.
2. Pelaksanaan program daerah.
3. Pengawasan pembangunan.
4. Pengembangan ekonomi lokal.

Riristuningsia et al. (2017) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan efektivitas pembangunan desa dan daerah. Pembangunan partisipatif mampu:

1. Meningkatkan keberlanjutan program.
2. Memperkuat ekonomi lokal.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Ruang Lingkup dan Tujuan Ekonomi Regional

Ekonomi regional memiliki ruang lingkup yang luas karena membahas berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam suatu wilayah serta hubungan ekonomi antarwilayah. Kajian ekonomi regional tidak hanya menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mencakup distribusi sumber daya, pola investasi, infrastruktur, mobilitas tenaga kerja, struktur industri, urbanisasi, dan kebijakan pembangunan wilayah. Perbedaan karakteristik geografis dan sosial menyebabkan setiap daerah memiliki pola perkembangan ekonomi yang berbeda sehingga pendekatan ekonomi regional diperlukan untuk memahami dinamika pembangunan secara lebih spesifik.

Hoover dan Giarratani (1971) menjelaskan bahwa ekonomi regional mempelajari bagaimana lokasi dan ruang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki keunggulan ekonomi. Oleh sebab itu, ekonomi regional menjadi

penting dalam perencanaan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara lebih seimbang dan efisien.

Capello (2007) menjelaskan bahwa ruang lingkup ekonomi regional berkembang dari sekadar analisis lokasi industri menjadi kajian yang lebih kompleks mengenai pembangunan wilayah, inovasi regional, daya saing daerah, dan interaksi ekonomi global. Perubahan ekonomi modern menyebabkan wilayah tidak lagi hanya bersaing berdasarkan sumber daya alam, tetapi juga berdasarkan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan konektivitas ekonomi.

Harsono et al. (2025) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi kewilayahan bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemanfaatan potensi lokal, penguatan sektor unggulan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

1.2.1 Ruang Lingkup Ekonomi Regional

Ruang lingkup ekonomi regional mencakup berbagai aspek ekonomi yang berkaitan dengan wilayah dan pembangunan daerah. Kajian ekonomi regional meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Struktur ekonomi daerah.
3. Ketimpangan antarwilayah.
4. Pengembangan sektor unggulan.
5. Infrastruktur ekonomi.
6. Urbanisasi dan migrasi.
7. Investasi regional.
8. Perdagangan antarwilayah.
9. Pengembangan sumber daya manusia.
10. Pembangunan desa dan kawasan perkotaan.

Hoover dan Giarratani (1971) menjelaskan bahwa ekonomi regional berusaha memahami pola distribusi kegiatan ekonomi dalam ruang geografis tertentu. Ekonomi regional juga mempelajari hubungan antara:

1. Lokasi geografis.
2. Aktivitas ekonomi.
3. Mobilitas penduduk.
4. Pemanfaatan sumber daya.

Capello (2007) menjelaskan bahwa analisis ekonomi regional digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing wilayah. Kajian ekonomi regional memiliki peran penting dalam:

1. Penyusunan kebijakan daerah.
2. Perencanaan pembangunan.
3. Pengurangan ketimpangan ekonomi.
4. Penentuan prioritas investasi.

1.2.2 Tujuan Ekonomi Regional

Ekonomi regional memiliki berbagai tujuan yang berkaitan dengan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama ekonomi regional meliputi:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah menjadi tujuan utama pembangunan regional. Arsyad (2010) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat.

2. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah

Pembangunan regional bertujuan menciptakan pemerataan pembangunan. Harsono et al. (2025) menjelaskan bahwa pembangunan kewilayahan bertujuan memperkuat wilayah tertinggal melalui pengembangan ekonomi lokal.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan wilayah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui:

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Kesempatan kerja.
- d. Pendapatan.

4. Mengembangkan Potensi Lokal

Setiap wilayah memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Pengembangan potensi lokal membantu meningkatkan daya saing daerah.

5. Meningkatkan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Ekonomi regional membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar pembangunan lebih efisien dan berkelanjutan.

1.3 Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Wilayah

Teori pertumbuhan dan pembangunan wilayah merupakan dasar penting dalam ekonomi regional untuk memahami bagaimana suatu daerah berkembang serta faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tingkat kemajuan antarwilayah. Berbagai teori pembangunan wilayah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata, melainkan dipengaruhi oleh lokasi geografis, sumber daya alam, investasi, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Perkembangan teori pembangunan wilayah juga menunjukkan perubahan pendekatan pembangunan, mulai dari orientasi pertumbuhan ekonomi semata hingga pendekatan pembangunan yang memperhatikan pemerataan, keberlanjutan, dan daya saing regional.

Capello (2007) menjelaskan bahwa teori ekonomi regional berkembang sebagai upaya memahami distribusi aktivitas ekonomi dalam ruang geografis. Wilayah yang memiliki keunggulan tertentu cenderung berkembang lebih cepat dibanding wilayah lain sehingga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Arsyad (2010) menjelaskan bahwa teori pembangunan wilayah digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Harsono et al. (2025) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi kewilayahan memerlukan pendekatan multidimensional yang memperhatikan potensi lokal, konektivitas wilayah, serta penguatan sektor unggulan daerah.

1.3.1 Teori Lokasi dan Pertumbuhan Wilayah

Teori lokasi menjadi salah satu dasar utama dalam ekonomi regional karena menjelaskan alasan suatu aktivitas ekonomi memilih lokasi tertentu. North (1955) menjelaskan bahwa lokasi

memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah karena menentukan efisiensi produksi dan distribusi. Faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi ekonomi meliputi:

1. Kedekatan dengan sumber bahan baku.
2. Kedekatan dengan pasar.
3. Ketersediaan tenaga kerja.
4. Infrastruktur transportasi.
5. Biaya produksi.

Hoover dan Giarratani (1971) menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang memberikan keuntungan ekonomi terbesar. Keuntungan lokasi dapat berupa:

1. Biaya distribusi rendah.
2. Akses pasar luas.
3. Infrastruktur memadai.
4. Ketersediaan teknologi.

Teori lokasi membantu menjelaskan mengapa:

1. Kawasan industri berkembang di kota besar.
2. Pelabuhan menjadi pusat perdagangan.
3. Wilayah tertentu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Capello (2007) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi wilayah modern dipengaruhi oleh aglomerasi ekonomi, yaitu konsentrasi aktivitas ekonomi pada lokasi tertentu yang menciptakan efisiensi dan daya saing lebih tinggi.

1.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan klasik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Pandangan klasik menekankan pentingnya akumulasi modal dan spesialisasi ekonomi dalam meningkatkan produksi. Teori pertumbuhan klasik memiliki beberapa karakteristik:

1. Fokus pada produksi dan investasi.
2. Pertumbuhan dipengaruhi akumulasi modal.
3. Tenaga kerja menjadi faktor utama produksi.

4. Sumber daya alam dianggap penting bagi pembangunan.

Arsyad (2010) menjelaskan bahwa teori klasik menjadi dasar awal dalam memahami pembangunan ekonomi wilayah. Dalam pembangunan wilayah, teori klasik digunakan untuk:

1. Mengembangkan sektor produksi.
2. Meningkatkan investasi daerah.
3. Memperluas kesempatan kerja.

Kelemahan teori klasik terletak pada keterbatasannya dalam menjelaskan:

1. Ketimpangan wilayah.
2. Peran teknologi.
3. Faktor kelembagaan.
4. Perbedaan kualitas sumber daya manusia.

1.3.3 Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh:

1. Modal.
2. Tenaga kerja.
3. Teknologi.

Solow menekankan bahwa kemajuan teknologi menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam teori neoklasik:

1. Investasi meningkatkan kapasitas produksi.
2. Teknologi meningkatkan produktivitas.
3. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara berkelanjutan.

Arsyad (2010) menjelaskan bahwa teori neoklasik memandang mobilitas modal dan tenaga kerja dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah. Teori ini menjelaskan bahwa wilayah tertinggal dapat berkembang apabila:

1. Investasi meningkat.
2. Infrastruktur diperbaiki.
3. Teknologi berkembang.
4. SDM meningkat.

Becker (1964) menjelaskan bahwa human capital menjadi komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi modern. Kualitas sumber daya manusia meliputi:

1. Pendidikan.
2. Keterampilan.
3. Inovasi.
4. Produktivitas kerja.

Harsono (2024) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi wilayah modern membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar daerah mampu bersaing dalam ekonomi global.

1.3.4 Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menjelaskan bahwa pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh sektor basis atau sektor unggulan yang mampu menghasilkan pendapatan dari luar wilayah. North (1955) menjelaskan bahwa sektor basis menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor basis meliputi:

1. Industri ekspor.
2. Pariwisata.
3. Pertanian komersial.
4. Pertambangan.

Pendapatan yang diperoleh dari luar daerah akan meningkatkan:

1. Investasi lokal.
2. Konsumsi masyarakat.
3. Aktivitas ekonomi regional.

Sektor nonbasis merupakan sektor yang melayani kebutuhan lokal masyarakat. Contoh sektor nonbasis:

1. Perdagangan lokal.
2. Jasa lokal.
3. Transportasi lokal.

Harsono et al. (2023) menjelaskan bahwa identifikasi sektor unggulan penting untuk menentukan prioritas

pembangunan ekonomi daerah. Teori basis ekonomi banyak digunakan dalam:

1. Perencanaan pembangunan daerah.
2. Penentuan sektor prioritas.
3. Penyusunan kebijakan investasi regional.

1.3.5 Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*)

Teori kutub pertumbuhan dikembangkan untuk menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak terjadi secara merata, tetapi terpusat pada wilayah tertentu. Hirschman (1958) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung secara tidak seimbang karena investasi lebih banyak terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu. Kutub pertumbuhan biasanya memiliki:

1. Infrastruktur lengkap.
2. Industri besar.
3. Akses transportasi baik.
4. Konsentrasi tenaga kerja.

Wilayah pusat pertumbuhan mampu memberikan efek penyebaran ekonomi ke wilayah sekitar. Dampak positif kutub pertumbuhan:

1. Meningkatkan investasi.
2. Membuka lapangan kerja.
3. Mendorong pertumbuhan sektor lain.

Dampak negatif kutub pertumbuhan:

1. Urbanisasi berlebihan.
2. Ketimpangan wilayah.
3. Konsentrasi pembangunan.

Glasson (1990) menjelaskan bahwa pusat pertumbuhan menjadi alat penting dalam strategi pembangunan regional modern.

1.3.6 Teori Kausalitas Kumulatif

Teori kausalitas kumulatif dikembangkan oleh Myrdal untuk menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dapat

memperbesar kesenjangan antarwilayah. Myrdal (1957) menjelaskan bahwa wilayah maju akan terus berkembang karena memiliki:

1. Investasi besar.
2. Infrastruktur baik.
3. SDM berkualitas.
4. Teknologi lebih maju.

Wilayah tertinggal cenderung mengalami hambatan pembangunan karena:

1. Modal terbatas.
2. Infrastruktur rendah.
3. Produktivitas rendah.

Proses ini menciptakan efek kumulatif yang memperbesar perbedaan pembangunan antarwilayah. Kuncoro (2018) menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi pembangunan untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Bentuk intervensi pemerintah meliputi:

1. Pembangunan infrastruktur.
2. Insentif investasi.
3. Pengembangan kawasan tertinggal.
4. Peningkatan kualitas pendidikan.

Harsono et al. (2025) menjelaskan bahwa pembangunan wilayah harus memperhatikan pemerataan agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.

1.3.7 Teori Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah karena mendukung mobilitas ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Gramlich (1994) menjelaskan bahwa investasi infrastruktur memberikan kontribusi besar terhadap produktivitas ekonomi. Jenis infrastruktur yang mempengaruhi pembangunan wilayah:

1. Jalan raya.
2. Pelabuhan.
3. Bandara.

4. Energi listrik.
5. Telekomunikasi.
6. Infrastruktur digital.

Infrastruktur memberikan dampak berupa:

1. Penurunan biaya distribusi.
2. Peningkatan investasi.
3. Perluasan pasar.
4. Peningkatan efisiensi ekonomi.

Afriyana et al. (2023) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah. Harsono et al. (2024) menjelaskan bahwa infrastruktur menjadi salah satu faktor utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

1.3.8 Teori Pembangunan Berbasis Potensi Lokal

Pembangunan wilayah modern menekankan pentingnya pengembangan potensi lokal sebagai dasar pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi lokal meliputi:

1. Sumber daya alam.
2. Budaya lokal.
3. Sektor unggulan daerah.
4. UMKM.
5. Pariwisata lokal.

Harsono et al. (2025) menjelaskan bahwa pembangunan kewilayahan harus berbasis karakteristik lokal agar pembangunan lebih berkelanjutan. Pengembangan potensi lokal memberikan manfaat:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Memperkuat ekonomi daerah.
3. Mengurangi ketergantungan eksternal.
4. Meningkatkan daya saing wilayah.

1.3.9 Teori Pembangunan Partisipatif

Pembangunan wilayah memerlukan keterlibatan masyarakat agar pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan.

Riristuningsia et al. (2017) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan keberhasilan pembangunan desa dan wilayah. Partisipasi masyarakat meliputi:

1. Perencanaan pembangunan.
2. Pengawasan pembangunan.
3. Pengelolaan ekonomi lokal.
4. Pengembangan usaha masyarakat.

Pembangunan partisipatif membantu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengurangi konflik sosial.
3. Memperkuat pembangunan lokal.

1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses peningkatan kapasitas ekonomi suatu wilayah yang ditandai oleh meningkatnya produksi, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, serta kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi regional tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, teknologi, dan lingkungan. Perbedaan kualitas faktor-faktor tersebut menyebabkan setiap wilayah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda.

Capello (2007) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah dipengaruhi oleh kombinasi antara sumber daya lokal, konektivitas spasial, kualitas institusi, dan kemampuan inovasi daerah. Wilayah yang mampu mengelola faktor-faktor tersebut secara optimal akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi dibanding wilayah lain. Harsono (2024) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi wilayah modern membutuhkan pendekatan terintegrasi yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan sektor unggulan, serta keberlanjutan lingkungan.

1.4.1 Sumber Daya Alam sebagai Faktor Pertumbuhan Wilayah

Sumber daya alam menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi regional karena menyediakan bahan baku produksi, sumber energi, dan peluang investasi ekonomi. Jenis sumber daya alam yang memengaruhi pembangunan wilayah meliputi:

1. Pertanian.
2. Perkebunan.
3. Kehutanan.
4. Perikanan.
5. Pertambangan.
6. Energi.

Wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah cenderung memiliki peluang pertumbuhan ekonomi lebih besar apabila dikelola secara efektif. Arsyad (2010) menjelaskan bahwa sumber daya alam dapat menjadi modal awal pembangunan ekonomi wilayah, terutama bagi daerah berkembang. Kontribusi sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi regional meliputi:

1. Peningkatan pendapatan daerah.
2. Pembukaan lapangan kerja.
3. Mendorong aktivitas industri.
4. Meningkatkan ekspor daerah.

Marlianti et al. (2017) menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui penciptaan nilai tambah dan kesempatan kerja. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dapat menimbulkan:

1. Kerusakan lingkungan.
2. Ketimpangan ekonomi.
3. Ketergantungan ekonomi primer.
4. Penurunan kualitas ekosistem.

1.4.2 Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Infrastruktur merupakan faktor strategis dalam pertumbuhan ekonomi regional karena mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang maupun jasa. Jenis infrastruktur ekonomi meliputi:

1. Jalan raya.
2. Pelabuhan.
3. Bandara.
4. Sistem transportasi.
5. Energi listrik.
6. Telekomunikasi.
7. Infrastruktur digital.

Gramlich (1994) menjelaskan bahwa investasi infrastruktur memiliki dampak besar terhadap produktivitas ekonomi dan efisiensi regional. Infrastruktur yang baik mampu:

1. Menurunkan biaya logistik.
2. Mempercepat distribusi barang.
3. Meningkatkan investasi.
4. Memperluas akses pasar.
5. Memperkuat konektivitas antardaerah.

Afriyana et al. (2023) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Harsono et al. (2024) menjelaskan bahwa kontribusi infrastruktur sangat penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Keterbatasan infrastruktur menyebabkan berbagai hambatan pembangunan seperti:

1. Tingginya biaya transportasi.
2. Rendahnya investasi.
3. Terisolasinya wilayah.
4. Ketimpangan pembangunan.

1.4.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan wilayah karena menentukan produktivitas, inovasi, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Becker (1964)

menjelaskan bahwa human capital menjadi modal utama dalam pertumbuhan ekonomi modern. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Keterampilan kerja.
4. Penguasaan teknologi.
5. Produktivitas tenaga kerja.

Wilayah yang memiliki kualitas sumber daya manusia tinggi cenderung:

- Lebih produktif.
- Mudah beradaptasi terhadap perubahan ekonomi.
- Memiliki inovasi lebih baik.
- Lebih kompetitif.

Harsono et al. (2024) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di daerah. Peningkatan kualitas SDM memberikan dampak berupa:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Mengurangi pengangguran.
3. Memperkuat ekonomi lokal.
4. Menarik investasi.

Keterbatasan kualitas SDM menyebabkan:

1. Produktivitas rendah.
2. Kemiskinan struktural.
3. Ketimpangan pembangunan.
4. Rendahnya daya saing daerah.

Acemoglu dan Robinson (2012) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan produktivitas ekonomi.

1.4.4 Investasi dan Pembentukan Modal

Investasi menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi regional karena meningkatkan kapasitas produksi dan

aktivitas ekonomi wilayah. Jenis investasi yang memengaruhi pembangunan wilayah meliputi:

1. Investasi pemerintah.
2. Investasi swasta.
3. Penanaman modal asing.
4. Investasi infrastruktur.
5. Investasi industri.

Hirschman (1958) menjelaskan bahwa investasi mampu menciptakan efek pengganda ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain.

Dampak investasi terhadap pembangunan wilayah meliputi:

1. Peningkatan produksi.
2. Pembukaan lapangan kerja.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Pertumbuhan sektor industri.

Wilayah yang memiliki iklim investasi baik cenderung lebih cepat berkembang. Faktor yang memengaruhi investasi daerah meliputi:

1. Stabilitas ekonomi.
2. Infrastruktur.
3. Regulasi pemerintah.
4. Keamanan wilayah.
5. Ketersediaan tenaga kerja.

Harsono et al. (2025) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi kewilayahan memerlukan strategi investasi berbasis potensi lokal untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Keterbatasan investasi dapat menyebabkan:

1. Lambatnya pertumbuhan ekonomi.
2. Rendahnya industrialisasi.
3. Tingginya pengangguran.

1.4.5 Teknologi dan Inovasi

Perkembangan teknologi menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah. Cooke dan

Leydesdorff (2006) menjelaskan bahwa ekonomi berbasis pengetahuan menjadi penggerak utama pembangunan wilayah modern. Teknologi memberikan dampak terhadap:

1. Efisiensi produksi.
2. Peningkatan produktivitas.
3. Percepatan distribusi informasi.
4. Pengembangan industri modern.

Inovasi ekonomi meliputi:

1. Teknologi industri.
2. Digitalisasi ekonomi.
3. Otomasi produksi.
4. Sistem informasi ekonomi.

Hidalgo dan Hausmann (2009) menjelaskan bahwa kompleksitas ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh kemampuan inovasi dan diversifikasi ekonomi. Wilayah yang mampu mengembangkan inovasi akan memiliki:

1. Daya saing tinggi.
2. Produktivitas meningkat.
3. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Harsono (2024) menjelaskan bahwa transformasi ekonomi wilayah memerlukan penguatan inovasi dan teknologi agar daerah mampu bersaing dalam ekonomi global.

1.4.6 Kebijakan Pemerintah dan Kelembagaan

Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Peran pemerintah dalam pembangunan wilayah meliputi:

1. Penyediaan infrastruktur.
2. Pengaturan investasi.
3. Pengembangan pendidikan.
4. Pengurangan kemiskinan.
5. Penguatan ekonomi lokal.

Acemoglu dan Robinson (2012) menjelaskan bahwa institusi yang inklusif menjadi faktor utama keberhasilan

pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan wilayah yang efektif mampu:

1. Mengurangi ketimpangan.
2. Mendorong investasi.
3. Meningkatkan produktivitas.
4. Memperkuat pemerataan pembangunan.

Kuncoro (2018) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berbasis kebutuhan dan potensi lokal agar kebijakan lebih efektif. Kelemahan kelembagaan dapat menyebabkan:

1. Korupsi.
2. Inefisiensi pembangunan.
3. Ketimpangan wilayah.
4. Lambatnya pertumbuhan ekonomi.

1.4.7 Urbanisasi dan Konsentrasi Aktivitas Ekonomi

Urbanisasi menjadi bagian penting dalam pembangunan wilayah karena kota berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hoover dan Giarratani (1971) menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah perkotaan karena adanya keuntungan aglomerasi. Keuntungan aglomerasi meliputi:

1. Efisiensi produksi.
2. Kedekatan pasar.
3. Konsentrasi tenaga kerja.
4. Infrastruktur lengkap.

Urbanisasi memberikan dampak positif berupa:

1. Peningkatan investasi.
2. Pertumbuhan industri.
3. Perluasan pasar tenaga kerja.

Urbanisasi juga dapat menimbulkan:

1. Kepadatan penduduk.
2. Kemacetan.
3. Permukiman kumuh.
4. Ketimpangan desa-kota.

Myrdal (1957) menjelaskan bahwa pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah tertentu dapat memperbesar ketimpangan antarwilayah.

1.4.8 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan regional. Riristuningsia et al. (2017) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan efektivitas pembangunan desa dan wilayah. Bentuk partisipasi masyarakat meliputi:

1. Perencanaan pembangunan.
2. Pengawasan pembangunan.
3. Pengembangan usaha lokal.
4. Penguatan ekonomi masyarakat.

Partisipasi masyarakat membantu:

1. Meningkatkan keberlanjutan pembangunan.
2. Memperkuat ekonomi lokal.
3. Mengurangi konflik sosial.

Harsono et al. (2025) menjelaskan bahwa pembangunan kewilayahan modern harus melibatkan masyarakat secara aktif agar hasil pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail*, Crown Business. New York.
- Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., & Harsono, I. (2023). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2021. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1-12.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan: UPP STIM YKPN*.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital* University of Chicago Press.
- Capello, R. (2007). *Regional Economics* Routledge.
- Glasson, J. (1990). *Pengantar perencanaan regional. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: LPEUI*.
- Gramlich, E. M. (1994). Infrastructure investment: A review essay. *Journal of economic literature*, 32(3), 1176-1196.
- Harsono, I. (2024). Green development in Indonesia: socioeconomic impacts, environmental effects, and the role of social entrepreneurship. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(1), 412-430.
- Harsono, I. (2024). *Pertumbuhan ekonomi wilayah: Teori, kebijakan, dan aplikasinya dalam pembangunan desa*. Mega Press Nusantara.
- Harsono, I. W. A. N., Sutanto, H. I. M. A. W. A. N., Rois, I. H. S. A. N., Fadliyanti, L. U. L. U. K., & Mulawiani, B. S. W. (2024). Kontribusi Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ganec Swara Vol*, 18(1).
- Harsono, I., Fadlli, M. D., Hak, M. B. U., & Hidayat, A. A. (2023). Potential leading sector to drive economic growth in west Nusa Tenggara Province.
- Harsono, I., Sulistiowati, S., Apriyanto, A., & Demung, I. W. (2025). *Buku Referensi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press.

- Hoover, E. M., & Giarratani, F. (1971). An introduction to regional economics.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marlianti, N., Wahyunadi, I. H., & Harsono, I. (2017). The role of agricultural sector on the economy of West Nusa Tenggara (input-output analysis approach). *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(2), 176-189.
- Myrdal, G., & Sitohang, P. (1957). Economic theory and under-developed regions.
- North, D. C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. *Journal of Political Economy*.
- Odell, P. R. (1967). Book review: regional development policy: a case study of Venezuela by J. Friedmann, MIT Press, 1966, pp. 279, 64/-. *Urban Studies*, 4(3), 309-311.
- Riristuningsia, D., Wahyunadi, I. H., & Harsono, I. (2017). Public participation in rural development planning. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 57-65.

BAB 2

TEORI LOKASI, AGLOMERASI, DAN PERWILAYAHAN

2.1 Teori Lokasi Klasik

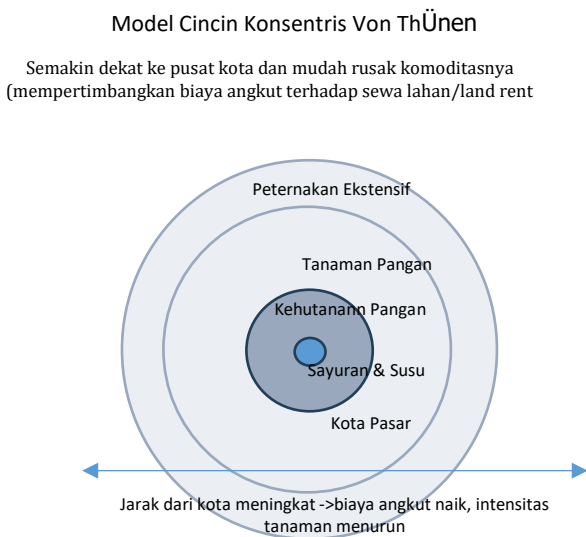
2.1.1 Model Cincin von Thünen: Ketika Jarak Menentukan Pilihan Tanam

Johann Heinrich von Thünen, seorang pemilik lahan pertanian di Mecklenburg, Jerman, menulis *Der isolierte Staat* pada 1826 setelah bertahun-tahun mengamati sendiri catatan produksi dan biaya di pertaniannya. Melalui pengamatan itu ia merumuskan salah satu model spasial tertua dalam ilmu ekonomi: sebuah kota pasar berdiri di tengah dataran yang homogen, dikelilingi lahan pertanian yang menyusun diri dalam cincin-cincin konsentris menurut jenis komoditasnya. Logikanya sebenarnya cukup lugas. Komoditas yang mudah rusak atau mahal diangkut, seperti sayuran segar, susu, atau hasil kebun, akan ditanam paling dekat dengan kota, sebab biaya transportasi yang tinggi hanya bisa ditutup jika jarak tempuhnya pendek. Sebaliknya, komoditas yang tahan simpan dan bernilai jual relatif rendah per satuan berat, seperti gandum atau kayu bakar, dapat ditanam lebih jauh karena selisih biaya angkutnya masih bisa ditoleransi oleh margin keuntungan.

Detail cincin-cincin itu sendiri sudah banyak berubah seiring kemajuan teknologi pendingin dan transportasi. Namun yang tetap relevan hingga sekarang bukanlah susunan persisnya, melainkan prinsip di baliknya: sewa lahan (*land rent*) pada dasarnya adalah fungsi dari jarak terhadap pasar, dan pola tata guna lahan pertanian di sekitar kota terbentuk dari interaksi antara nilai komoditas, biaya angkut, dan intensitas penggunaan lahan. Prinsip inilah yang masih bisa diamati, misalnya, pada pola sabuk sayuran (*vegetable belt*) di pinggiran kota-kota besar Indonesia, atau pada alasan peternakan sapi perah cenderung

berlokasi dekat kota sementara perkebunan kelapa sawit dapat bertahan jauh dari pusat pemasaran karena produknya diolah dahulu menjadi CPO yang lebih tahan dan bernilai lebih stabil per volume angkutnya.

Tentu model von Thünen memiliki keterbatasan yang tidak bisa diabaikan. Ia mengasumsikan dataran yang seragam, satu pasar tunggal, dan biaya angkut yang proporsional terhadap jarak, asumsi yang jarang ditemui persis seperti itu di lapangan, apalagi di wilayah kepulauan dengan topografi beragam seperti Indonesia. Namun sebagai kerangka berpikir awal untuk memahami mengapa lokasi budidaya pertanian tidak acak, model ini tetap menjadi rujukan dasar yang wajib dipahami sebelum melangkah ke teori-teori yang lebih rumit. Ilustrasi pola cincin konsentris tersebut, lengkap dengan urutan komoditas dari pusat kota ke pinggiran, disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Model Cincin Konsentris Von Thünen

2.1.1.2 Segitiga Lokasi Weber: Mencari Titik Ongkos Termurah

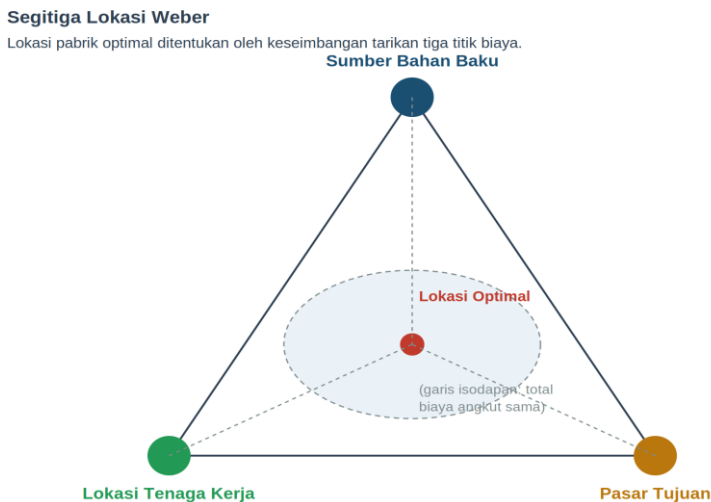
Jika von Thünen berbicara tentang pertanian, Alfred Weber pada 1909 mengalihkan perhatian ke industri. Dalam *Über*

den Standort der Industrien, Weber mengajukan pertanyaan yang berbeda: di titik mana sebuah pabrik sebaiknya didirikan agar total biaya produksi, terutama biaya transportasi bahan baku dan produk jadi ditambah biaya tenaga kerja, dapat ditekan seminimal mungkin? Ia menggambarkan persoalan ini sebagai sebuah segitiga lokasi, dengan tiga titik penting yang menjadi penarik: sumber bahan baku, lokasi tenaga kerja, dan pasar tujuan penjualan. Titik lokasi optimal pabrik ditentukan oleh keseimbangan gaya tarik dari ketiga titik tersebut, yang secara matematis dapat digambarkan melalui garis-garis isodapan, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik dengan total biaya transportasi yang sama.

Salah satu kontribusi penting Weber adalah pembedaan antara bahan baku yang bersifat *ubiquitous* (tersedia di mana saja, seperti air) dengan bahan baku *localized* (hanya tersedia di lokasi tertentu, seperti bijih tambang atau hasil kebun spesifik). Ia juga memperkenalkan konsep material index, yaitu rasio berat bahan baku terhadap berat produk jadi. Ketika rasio ini besar, artinya proses produksi banyak menyusutkan berat seperti pengolahan tebu menjadi gula atau kelapa sawit menjadi minyak mentah, maka lokasi pabrik cenderung tertarik mendekat ke sumber bahan baku, karena tidak masuk akal secara ekonomi mengangkut bahan mentah dalam jumlah besar jika sebagian besar volumenya akan terbuang sebagai limbah pengolahan. Sebaliknya, jika produk akhir justru lebih berat atau lebih rawan rusak dibanding bahan mentahnya, pabrik akan lebih cenderung berlokasi dekat pasar.

Prinsip material index ini barangkali salah satu warisan Weber yang paling langsung dapat diaplikasikan di sektor agroindustri. Pabrik gula, pabrik kelapa sawit, dan pengolahan susu segar hampir selalu ditemukan berdekatan dengan wilayah produksi bahan bakunya, bukan kebetulan melainkan konsekuensi logis dari rasio susut bobot yang tinggi dalam prosesnya. Weber sendiri kemudian menambahkan faktor aglomerasi sebagai penarik ketiga di luar biaya transportasi dan upah tenaga kerja, sebuah jembatan konseptual yang akan kita bahas lebih dalam pada sub-bab berikutnya. Keseimbangan

tarikan ketiga titik biaya tersebut — bahan baku, tenaga kerja, dan pasar — digambarkan secara skematis pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Segitiga Lokasi Weber

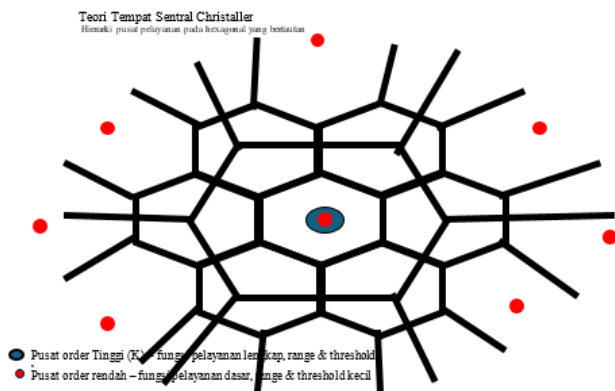
2.1.3 Teori Tempat Sentral Christaller: Hierarki di Balik Sebaran Kota

Berbeda dari von Thünen dan Weber yang berangkat dari satu komoditas atau satu pabrik, Walter Christaller pada 1933 mengamati fenomena yang lebih luas: mengapa permukiman-permukiman di selatan Jerman tersebar dalam pola yang tampak begitu teratur, dengan kota-kota besar mengelilingi diri dengan kota-kota kecil, dan kota-kota kecil itu sendiri dikelilingi desa-desa. Dari pengamatan lapangannya, Christaller merumuskan Teori Tempat Sentral (*Central Place Theory*), yang menjelaskan pola tersebut melalui dua konsep kunci: range (jangkauan maksimum konsumen bersedia menempuh jarak untuk mendapatkan suatu barang atau jasa) dan threshold (ambang batas jumlah permintaan minimum agar suatu usaha penyedia barang/jasa dapat bertahan).

Barang dan jasa dengan *threshold* rendah dan range pendek, seperti warung kelontong, tukang cukur, atau pasar harian, dapat ditemukan hampir di setiap desa, karena permintaan minimalnya kecil dan konsumen tidak bersedia menempuh jarak jauh untuk keperluan semacam itu. Sebaliknya,

layanan dengan *threshold* tinggi dan *range* jauh, seperti rumah sakit rujukan, universitas, atau pusat perbelanjaan besar, hanya dapat bertahan di kota-kota berukuran tertentu, dan konsumen dari wilayah sekitarnya bersedia menempuh jarak jauh untuk mengaksesnya. Dari sinilah muncul struktur hierarkis: semakin tinggi orde suatu pusat permukiman, semakin lengkap fungsi pelayanan yang tersedia di sana, dan semakin luas wilayah pengaruhnya (*hinterland*). Secara geometris, jika diasumsikan dataran homogen dan perilaku konsumen rasional mencari jarak terpendek, pola jangkauan pelayanan ini akan membentuk heksagon-heksagon yang saling bertautan tanpa celah maupun tumpang tindih, sebuah efisiensi spasial yang oleh Christaller dianggap sebagai pola optimal.

Bagi perencanaan wilayah, teori ini memberi kerangka yang sangat berguna untuk menyusun hierarki pusat pertumbuhan, mulai dari pusat kabupaten, kecamatan, hingga desa, lengkap dengan fungsi pelayanan yang semestinya disediakan di setiap jenjang. Dalam konteks agribisnis, prinsip ini pula yang mendasari penentuan lokasi pasar induk, sub-terminal agribisnis, atau balai penyuluhan pertanian: sejauh mana jangkauan pelayanan tersebut realistis menjangkau petani di sekitarnya, dan seberapa besar skala permintaan yang dibutuhkan agar fasilitas itu layak secara ekonomi untuk terus beroperasi. Pola heksagonal berjenjang yang menjadi ciri khas teori ini ditampilkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Hierarki Tempat Sentral Christaller

2.1.4 Penyempurnaan Lösch dan Sintesis Kritis

August Lösch, pada akhir 1930-an, mengoreksi model Christaller dari arah yang berbeda. Jika Christaller membangun modelnya dari sisi penawaran, yaitu bagaimana penyedia jasa mengatur diri secara efisien, Lösch justru berangkat dari sisi permintaan. Ia menggambarkan permintaan sebagai sebuah kerucut (*demand cone*): semakin jauh jarak dari titik penjualan, semakin tinggi harga yang harus dibayar konsumen akibat biaya transportasi, dan pada titik tertentu permintaan akan turun hingga nol. Titik itulah yang menentukan luas pasar optimal suatu perusahaan. Ketika model kerucut permintaan ini direplikasi ke seluruh dataran, hasilnya juga cenderung membentuk pola heksagonal, namun dengan variasi ukuran dan susunan hierarki yang lebih fleksibel dibanding model Christaller yang cenderung kaku.

Ditinjau secara keseluruhan, keempat teori lokasi klasik ini memang lahir dari konteks Eropa abad ke-19 dan awal abad ke-20, dengan asumsi dataran homogen yang jarang ditemukan persis di lapangan, apalagi di negara kepulauan tropis seperti Indonesia, dengan topografi pegunungan, sebaran pulau, dan perbedaan aksesibilitas antarwilayah yang jauh lebih kompleks. Literatur ekonomi wilayah berbahasa Indonesia, seperti karya Sjafrizal (2012) dan Tarigan (2005), umumnya memperkenalkan teori-teori ini sebagai titik berangkat, bukan sebagai model yang siap pakai tanpa penyesuaian. Nilai teori-teori ini pun bukan pada akurasi prediksinya secara harfiah, melainkan pada logika dasarnya: bahwa lokasi kegiatan ekonomi bukan hasil kebetulan, melainkan konsekuensi dari interaksi antara biaya transportasi, karakteristik komoditas, dan pola permintaan yang tersebar dalam ruang. Logika inilah yang kelak menjadi fondasi bagi teori-teori lokasi yang lebih kontemporer, termasuk teori aglomerasi yang akan dibahas berikutnya.

2.2 Teori dan Konsep Aglomerasi

2.2.1 Mengapa Kegiatan Ekonomi Suka Berkumpul

Jika teori lokasi klasik menjelaskan mengapa satu unit usaha memilih lokasi tertentu, teori aglomerasi menjawab

pertanyaan lanjutan: mengapa banyak unit usaha yang sejenis atau saling terkait cenderung berkumpul di lokasi yang sama, alih-alih menyebar merata mengikuti sebaran sumber daya. Fenomena ini dikenal sebagai *economies of agglomeration*, yakni penghematan biaya atau peningkatan produktivitas yang diperoleh perusahaan semata-mata karena berlokasi berdekatan dengan perusahaan lain.

Ada dua jenis aglomerasi yang lazim dibedakan dalam literatur. *Localization economies* merujuk pada manfaat yang muncul dari pengelompokan perusahaan-perusahaan sejenis, misalnya sentra kerajinan atau kawasan pengolahan hasil laut yang berkumpul di satu titik. *Urbanization economies*, di sisi lain, adalah manfaat yang timbul dari besarnya skala kota secara keseluruhan, terlepas dari sektor usahanya: semakin besar dan padat sebuah kota, semakin lengkap pula infrastruktur, pasar tenaga kerja, dan jaringan pendukung yang tersedia bagi berbagai jenis usaha yang beroperasi di dalamnya. Perbedaan dua jenis aglomerasi ini sendiri tidak sepenuhnya tanpa perdebatan; sejumlah ekonom regional bahkan mengkritik definisi klasik semacam ini karena dianggap belum cukup jernih membedakan sumber-sumber penghematan biaya yang sesungguhnya berbeda sifat (McCann, 1995).

2.2.2 Eksternalitas Marshallian: Tiga Sumber Keuntungan Berkerumun

Alfred Marshall, jauh sebelum istilah “klaster industri” populer, sudah mengamati fenomena distrik industri (*industrial district*) di Inggris pada akhir abad ke-19 dan merumuskan tiga sumber eksternalitas positif yang muncul dari konsentrasi spasial perusahaan sejenis. Pertama, *labor pooling*: pemusatan perusahaan sejenis di satu lokasi menciptakan pasar tenaga kerja terampil yang lebih tebal, sehingga perusahaan lebih mudah menemukan pekerja dengan keahlian spesifik, dan pekerja pun lebih leluasa berpindah antarperusahaan tanpa harus merelokasi tempat tinggal. Kedua, *input sharing*: konsentrasi usaha memungkinkan munculnya pemasok bahan baku, jasa pendukung, atau infrastruktur khusus yang baru layak secara ekonomi apabila permintaan gabungan dari banyak perusahaan mencukupi skala minimumnya. Ketiga,

knowledge spillover: kedekatan fisik mempermudah pertukaran informasi dan pengetahuan teknis secara informal, baik melalui pertemuan sehari-hari, mobilitas tenaga kerja antarperusahaan, maupun sekadar obrolan warung kopi antarpelaku usaha, sehingga mempercepat difusi inovasi di dalam klaster tersebut. Ketiga mekanisme eksternalitas ini dirangkum secara visual pada Gambar 2.4.

Ketiga mekanisme ini menjelaskan mengapa kawasan sentra industri kecil, sentra kerajinan, hingga kawasan agroindustri cenderung bertahan dan bahkan menguat dari waktu ke waktu meski tidak selalu didukung kebijakan yang terencana rapi. Studi berbasis data panel spasial di Tiongkok, misalnya, menemukan bahwa aglomerasi agroindustri memang meningkatkan pendapatan petani, tetapi jalur utamanya bukan lewat difusi teknologi langsung ke petani perorangan. Dampak positif itu justru lebih banyak bekerja melalui penguatan perusahaan agribisnis dan koperasi tani yang tumbuh di dalam kawasan aglomerasi tersebut, yang kemudian menarik petani untuk ikut serta lewat kemitraan, penyerapan tenaga kerja, dan sewa lahan (Ding, 2023). Pola serupa juga tampak pada berbagai kawasan sentra hortikultura, tebu, dan perikanan di Indonesia, di mana pengepul, penyedia sarana produksi, hingga jasa angkutan khusus komoditas tumbuh karena terkonsentrasinya produksi di satu kawasan, bukan karena tersebar



Gambar 2.4. Tiga Sumber Eksternalitas Marshallian

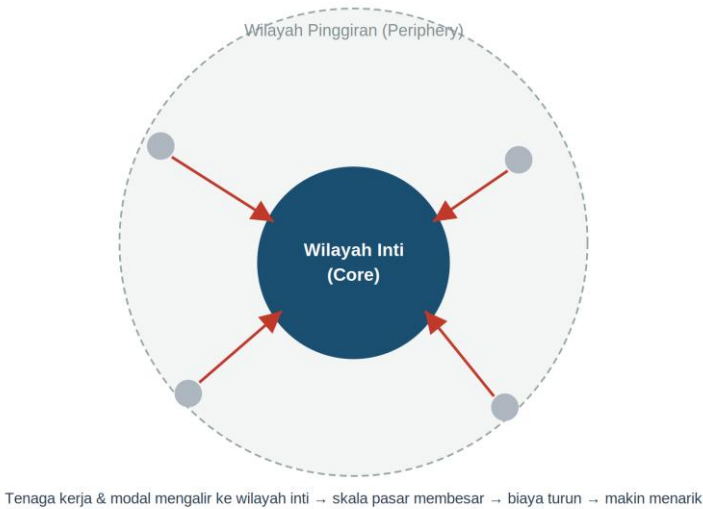
2.2.3 *New Economic Geography*: Skala Ekonomi Bertemu Biaya Transportasi

Pada dekade 1990-an, Paul Krugman menghidupkan kembali minat terhadap geografi ekonomi melalui apa yang kemudian dikenal sebagai *New Economic Geography* (NEG). Kontribusi utamanya adalah memformalkan secara matematis interaksi antara tiga elemen: skala ekonomi pada tingkat perusahaan (*increasing returns to scale*), biaya transportasi antarwilayah, dan mobilitas faktor produksi, terutama tenaga kerja (Krugman, 1991). Kerangka ini kemudian dikembangkan lebih rinci bersama Fujita dan Venables ke dalam model spasial yang lebih lengkap, mencakup interaksi antarwilayah dan perdagangan internasional (Fujita, Krugman, & Venables, 1999). Krugman menunjukkan bahwa ketika biaya transportasi cukup rendah namun belum nol, dan ketika terdapat skala ekonomi dalam produksi, maka kekuatan pasar justru akan mendorong konsentrasi aktivitas ekonomi di satu atau beberapa wilayah inti (*core*), sementara wilayah lain menjadi pinggiran (*periphery*) yang bergantung pada wilayah inti tersebut. Dinamika inti-pinggiran akibat sebab-akibat kumulatif ini digambarkan pada Gambar 2.5.

Proses ini dikenal dengan istilah *cumulative causation* atau sebab-akibat kumulatif. Wilayah yang sudah lebih dulu unggul cenderung menarik lebih banyak investasi dan tenaga kerja; kondisi itu memperbesar pasar lokal, menurunkan biaya rata-rata produksi, dan memperkuat daya tariknya dibanding wilayah lain. Tanpa intervensi kebijakan, proses semacam ini dapat melahirkan pola pembangunan yang timpang antarwilayah, tema yang akan kembali dibahas pada Bab 4 ketika membicarakan migrasi dan urbanisasi. NEG berbeda dari teori lokasi klasik bukan sekadar karena alat matematisnya lebih canggih, tetapi karena penekanannya pada sifat *self-reinforcing* dari aglomerasi: begitu satu wilayah mulai unggul, keunggulan itu cenderung melipatgandakan diri sendiri, bukan menyebar merata seperti diasumsikan model keseimbangan yang lebih sederhana.

Pola Inti-Pinggiran (New Economic Geography)

Sebab-akibat kumulatif memperkuat konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah inti.



Gambar 2.5. Pola Inti-Pinggiran dalam *New Economic Geography*

2.2.4 Klaster Agribisnis: Aglomerasi dalam Rantai Pasok Pertanian

Ketika prinsip-prinsip di atas diterapkan pada sektor pertanian dan agroindustri, hasilnya adalah apa yang lazim disebut klaster agribisnis atau *agro-based cluster*: konsentrasi spasial dari kegiatan produksi primer, pengolahan, distribusi, hingga jasa pendukung yang saling terkait dalam satu rantai nilai komoditas tertentu. Istilah klaster itu sendiri populer dalam kajian daya saing wilayah setelah Michael Porter menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif suatu industri sering kali justru menguat bukan meski adanya konsentrasi pesaing di satu lokasi, melainkan karena adanya konsentrasi tersebut (Porter, 1998). Kajian Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tentang klaster agro di berbagai negara berkembang mencatat bahwa klaster semacam ini umumnya tumbuh di sekitar komoditas ekspor bernilai tinggi, dan keberhasilannya sangat bergantung pada aksi kolektif antarpelaku di dalam klaster, yaitu kerja sama

antara petani, pelaku usaha pengolahan, asosiasi profesi, pemerintah daerah, dan lembaga penelitian (FAO, 2010; Otsuka & Ali, 2020).

Konteks Indonesia sendiri cukup banyak dikaji dalam literatur internasional. Riset tentang kerja sama petani dalam klaster agro di Jawa Barat menemukan bahwa keberadaan dalam suatu klaster meningkatkan kemungkinan petani untuk bekerja sama satu sama lain, dan kerja sama itulah yang pada akhirnya turut mendongkrak pendapatan mereka; kepadatan klaster yang lebih tinggi dan keragaman komoditas juga terbukti berasosiasi dengan pendapatan petani yang lebih baik (Wardhana, Ihle, & Heijman, 2020). Dengan kata lain, keberhasilan klaster tidak semata ditentukan oleh kedekatan lokasi secara fisik, melainkan juga oleh sejauh mana kerja sama antarpetani dapat tumbuh di dalamnya, dimensi kelembagaan yang sering luput dari perhatian ketika kebijakan klaster hanya difokuskan pada penyediaan infrastruktur. Temuan yang sejalan muncul dari kajian strategi pengembangan klaster berbasis pertanian di negara berkembang secara umum: dukungan kelembagaan, mulai dari akses pembiayaan, keterkaitan dengan lembaga riset, hingga pendampingan kebijakan daerah, menjadi penentu utama apakah sebuah klaster benar-benar tumbuh berkelanjutan atau berhenti sebagai kumpulan usaha yang kebetulan berlokasi berdekatan (Otsuka & Ali, 2020). Kajian terbaru tentang kapasitas inovasi klaster agribisnis di Nigeria bagian tengah menunjukkan pola yang sebanding: kedekatan spasial baru benar-benar berbuah pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan keterampilan apabila diiringi kolaborasi aktif antarpelaku klaster, dan bukan semata mengandalkan kehadiran kebijakan pemerintah (Mustapha, 2025). Sebaliknya, pada kawasan yang kelembagaan pendukungnya lemah, klaster agribisnis cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa keterkaitan yang kuat antarpelaku, sehingga potensi limpahan pengetahuan dan efisiensi skala yang semestinya menjadi keunggulan utama aglomerasi tidak sepenuhnya termanfaatkan.

Di sinilah pentingnya memahami bahwa aglomerasi bukan sekadar fenomena yang tumbuh dengan sendirinya, melainkan juga dapat, dan semestinya, difasilitasi lewat

kebijakan: penyediaan infrastruktur logistik di kawasan sentra produksi, insentif bagi investasi pengolahan hasil pertanian di dekat wilayah produksi, hingga penguatan kelembagaan petani agar mereka tidak hanya menjadi penonton dari nilai tambah yang tercipta di sepanjang rantai pasok komoditasnya sendiri.

2.2.5 Dua Sisi Mata Uang: Manfaat Aglomerasi dan Risiko Kesenjangan

Meski aglomerasi membawa banyak manfaat efisiensi, ada pula sisi yang perlu dicermati secara jujur. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang terlalu tinggi di satu titik dapat memicu deglomeration diseconomies: kemacetan, kenaikan harga lahan, persaingan berlebihan atas sumber daya lokal, hingga tekanan lingkungan yang pada titik tertentu justru menekan produktivitas alih-alih menaikkannya. Selain itu, sebagaimana disinggung dalam pembahasan NEG, proses *cumulative causation* yang terus-menerus menguntungkan wilayah inti berpotensi memperlebar kesenjangan dengan wilayah pinggiran yang tertinggal. Ini adalah dilema klasik dalam perencanaan wilayah antara efisiensi dan pemerataan, yang akan terus kita jumpai sepanjang buku ini.

2.3 Teori Perwilayahan (*Regionalization*)

2.3.1 Wilayah Formal dan Wilayah Fungsional

Sebelum membahas bagaimana wilayah direncanakan, perlu dipahami dahulu bahwa istilah “wilayah” itu sendiri dapat dimaknai dengan cara yang berbeda tergantung tujuan analisisnya. Wilayah formal (*formal region* atau *homogeneous region*) didefinisikan berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu, misalnya wilayah agroekologi dengan kesamaan jenis tanah dan iklim, atau wilayah administratif dengan batas kewenangan pemerintahan yang sama. Wilayah fungsional (*functional region* atau *nodal region*), sebaliknya, didefinisikan berdasarkan keterkaitan fungsional antarbagian di dalamnya, biasanya mengelilingi satu simpul pusat (node) yang menjadi tujuan aliran barang, jasa, tenaga kerja, atau informasi dari wilayah-wilayah di sekitarnya.

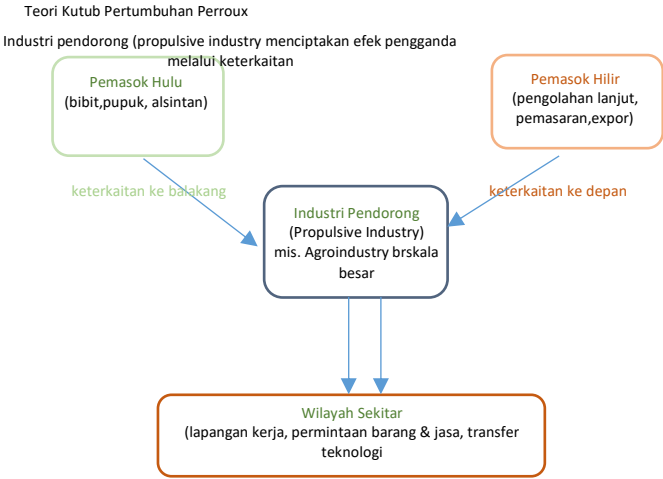
Perbedaan ini bukan sekadar persoalan definisi administratif, melainkan menentukan pendekatan perencanaan yang tepat. Merencanakan kawasan sentra produksi hortikultura, misalnya, memerlukan pendekatan wilayah fungsional yang memperhitungkan keterkaitan antara kawasan produksi, pasar pengumpul, dan pusat distribusi, yang batas-batasnya belum tentu sama dengan batas kabupaten atau kecamatan. Pengabaian terhadap perbedaan ini kerap menjadi sumber ketidaksesuaian antara kebijakan administratif dan realitas keterkaitan ekonomi di lapangan.

2.3.2 Teori Kutub Pertumbuhan Perroux

Konsep kutub pertumbuhan (*growth pole*) berakar dari gagasan ekonom Prancis François Perroux tentang *economic space*, yang ia kemukakan pertama kali pada 1950: ruang ekonomi yang menurutnya tidak selalu identik dengan ruang geografis, melainkan lebih tepat dipahami sebagai medan gaya dan jaringan hubungan antarunit ekonomi (Perroux, 1950). Pemikiran inilah yang kemudian ia kembangkan lebih lanjut menjadi rumusan yang lebih eksplisit tentang kutub pertumbuhan pada pertengahan dekade yang sama. Dari gagasan itu, Perroux berargumen bahwa pertumbuhan tidak pernah muncul serentak di mana-mana, melainkan selalu berawal dari titik-titik tertentu, yakni kutub pertumbuhan, sebelum menyebar ke wilayah lain melalui berbagai saluran keterkaitan.

Inti dari teori ini terletak pada peran industri pendorong (*propulsive industry*): sebuah industri berskala besar dan dinamis yang mampu menciptakan efek pengganda melalui keterkaitan ke depan dan ke belakang dengan industri-industri lain. Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) terjadi ketika industri pendorong menciptakan permintaan bagi pemasok bahan bakunya, sementara keterkaitan ke depan (*forward linkage*) muncul ketika keluarannya menjadi input bagi industri hilir. Semakin kuat kedua jenis keterkaitan ini, semakin besar pula efek pengganda yang dirasakan wilayah di sekitar kutub pertumbuhan tersebut, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja, permintaan barang dan jasa, maupun transfer teknologi.

Dalam konteks agribisnis, logika kutub pertumbuhan ini kerap menjadi rujukan bagi penetapan kawasan agropolitan atau kawasan sentra produksi unggulan: sebuah komoditas atau industri pengolahan berskala cukup besar diharapkan berperan sebagai penggerak yang menarik tumbuhnya usaha pendukung di sekitarnya, mulai dari penyedia bibit dan pupuk, jasa alat mesin pertanian, unit pengolahan pascapanen, hingga jasa logistik dan pemasaran. Namun pengalaman implementasi kebijakan kutub pertumbuhan di berbagai negara, termasuk yang didokumentasikan Glasson dalam kajiannya atas kebijakan regional di Inggris, juga memberi pelajaran penting: efek pengganda yang diharapkan menyebar ke wilayah sekitar tidak selalu terjadi secara otomatis (Glasson, 1974). Tanpa keterkaitan struktural yang memang dirancang dan didukung infrastruktur penghubung yang memadai, kutub pertumbuhan bisa saja tumbuh sendiri sebagai enclave yang menyedot sumber daya wilayah sekitarnya tanpa memberi imbal balik yang sepadan. Mekanisme keterkaitan ke depan dan ke belakang dari industri pendorong terhadap wilayah sekitarnya divisualisasikan pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6. Keterkaitan Industri Pendorong dalam Teori Kutub Pertumbuhan Perroux

2.3.3 Hierarki Wilayah dan Keterkaitan Desa-Kota

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan Teori Tempat Sentral, wilayah pada dasarnya tersusun dalam hierarki fungsi pelayanan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga wilayah metropolitan. Struktur hierarkis ini melahirkan apa yang dikenal sebagai keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkage*): aliran dua arah antara wilayah perdesaan yang umumnya menjadi basis produksi primer, dengan wilayah perkotaan yang menyediakan fungsi pengolahan, distribusi, jasa keuangan, dan pasar akhir.

Keterkaitan ini bekerja dalam dua arah yang saling menguatkan. Dari desa ke kota mengalir hasil pertanian, tenaga kerja, dan bahan baku; dari kota ke desa mengalir sarana produksi, teknologi, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga informasi pasar. Kelemahan keterkaitan ini di banyak wilayah Indonesia justru sering menjadi akar persoalan: jalan yang buruk, sistem informasi pasar yang lemah, atau ketiadaan fasilitas pengolahan tingkat menengah antara desa dan kota, semuanya berkontribusi pada rendahnya nilai tambah yang dinikmati petani, sekaligus memperlambat proses transfer teknologi dan informasi yang semestinya mengalir dari kota ke desa.

2.3.4 Kerangka Perencanaan Wilayah menurut Glasson

John Glasson, dalam karyanya *An Introduction to Regional Planning*, memberikan kerangka yang lebih operasional tentang bagaimana konsep-konsep teoretis di atas diterjemahkan ke dalam praktik perencanaan. Glasson menekankan bahwa perencanaan wilayah pada dasarnya adalah upaya menjembatani dua tingkat kebijakan yang sering berjalan sendiri-sendiri: kebijakan pembangunan nasional yang bersifat makro dan sektoral, dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah yang karakteristiknya sangat beragam (Glasson, 1974). Dari pengalaman kebijakan regional di Inggris yang ia kaji, Glasson menyoroti bahwa keberhasilan perencanaan wilayah sangat ditentukan oleh tiga hal: ketepatan diagnosis atas persoalan struktural wilayah (apakah persoalannya kekurangan investasi, migrasi keluar tenaga kerja terampil, atau ketimpangan infrastruktur), kejelasan kriteria dalam menetapkan kawasan

prioritas pembangunan (*assisted areas* atau kawasan yang mendapat perlakuan khusus), serta koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaannya.

Pengalaman kebijakan regional Inggris yang diulas Glasson juga memberi pelajaran yang relevan bagi konteks Indonesia: kebijakan yang semata mengandalkan relokasi tenaga kerja dari wilayah tertinggal ke wilayah maju (*labor migration policy*) sering kali kurang efektif dibanding kebijakan yang mendorong industri untuk berlokasi di wilayah tertinggal itu sendiri (*industrial location policy*). Pemindahan tenaga kerja memang dapat mengurangi tekanan pengangguran di wilayah asal dalam jangka pendek, tetapi berisiko mengeringkan wilayah tersebut dari sumber daya manusia produktifnya dalam jangka panjang, sementara wilayah tujuan migrasi justru menanggung beban penyediaan lapangan kerja dan infrastruktur tambahan. Pelajaran inilah yang kelak akan kita bahas lebih mendalam ketika membicarakan migrasi dan urbanisasi pada Bab 4.

2.3.5 Aplikasi pada Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi Pangan

Konsep kawasan agropolitan yang berkembang di Indonesia sejak awal 2000-an pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan gagasan kutub pertumbuhan dan hierarki wilayah ke dalam konteks pembangunan pertanian (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2011). Sebuah kawasan agropolitan dirancang bukan sebagai satu titik produksi tunggal, melainkan sebagai sistem wilayah fungsional yang terdiri atas kota tani (*agropolis*) sebagai pusat pelayanan, yaitu penyedia sarana produksi, pasar, dan jasa pengolahan, yang dikelilingi hinterland produksi pertanian di desa-desa sekitarnya.

Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada seberapa cermat perencana memahami keterkaitan fungsional yang sesungguhnya terjadi di lapangan, bukan sekadar menetapkan batas kawasan berdasarkan garis administratif semata. Kawasan sentra produksi hortikultura di dataran tinggi, misalnya, memerlukan keterkaitan yang berbeda dengan kawasan sentra tebu di dataran rendah, baik dari sisi pola distribusi, kebutuhan infrastruktur pengolahan, maupun skala

pasar yang harus dijangkau agar fasilitas pendukungnya layak secara ekonomi. Di sinilah ketiga kerangka teoretis yang telah dibahas, yaitu lokasi, aglomerasi, dan perwilayahan, perlu dipahami bukan sebagai tiga kotak yang terpisah, melainkan sebagai satu rangkaian analisis yang saling melengkapi.

2.4 Integrasi Teori dalam Perencanaan

Pembangunan Wilayah Berbasis Agribisnis

Menyatukan kembali ketiga kerangka yang telah dibahas, perencanaan kawasan berbasis agribisnis pada dasarnya membutuhkan tiga lapis pertanyaan yang berurutan. Pertama, pertanyaan lokasi: di mana titik optimal bagi kegiatan produksi dan pengolahan, dengan mempertimbangkan karakteristik komoditas, rasio susut bobot dalam pengolahan, serta jarak terhadap pasar, sebagaimana diajarkan von Thünen dan Weber. Kedua, pertanyaan aglomerasi: sejauh mana kegiatan-kegiatan yang saling terkait dalam rantai nilai komoditas tersebut perlu dan dapat difasilitasi untuk berkumpul secara spasial, agar tercipta labor pooling, input sharing, dan knowledge spillover sebagaimana dirumuskan Marshall dan diperkuat secara matematis oleh Krugman. Ketiga, pertanyaan perwilayahan: bagaimana kawasan tersebut diposisikan dalam hierarki wilayah yang lebih luas, apa fungsi kutub pertumbuhannya, dan keterkaitan macam apa yang perlu dibangun dengan wilayah lain di sekitarnya, termasuk keterkaitan desa-kota yang menjamin nilai tambah tidak hanya dinikmati sepihak oleh kota, sementara desa hanya menjadi penyedia bahan mentah.

Sebagai ilustrasi, ambil contoh kawasan sentra produksi hortikultura di dataran tinggi. Pertanyaan lokasi akan menuntun pada penentuan zona tanam berdasarkan kesesuaian agroekologi dan jarak tempuh ke pasar pengumpul, mengingat sifat komoditas hortikultura yang mudah rusak. Pertanyaan aglomerasi mengarahkan pada perlunya kolokasi antara kelompok tani, unit pengemasan (*packing house*), penyedia sarana produksi, hingga jasa transportasi berpendingin dalam satu kawasan yang saling berdekatan, agar biaya transaksi antarpelaku dapat ditekan dan pengetahuan teknis tentang

penanganan pascapanen dapat menyebar lebih cepat antarpelaku usaha. Sementara itu, pertanyaan perwilayahan menuntun pada penentuan peran kawasan tersebut dalam sistem distribusi yang lebih luas: apakah ia berfungsi sebagai pemasok pasar lokal, ataukah dirancang untuk menjangkau pasar antarwilayah bahkan ekspor, yang tentu menuntut keterkaitan infrastruktur dan kelembagaan yang berbeda skalanya.

Pendekatan serupa berlaku pula pada kawasan sentra tebu, kawasan perikanan tangkap, atau kawasan peternakan sapi perah, meski karakteristik teknis masing-masing komoditas tentu menuntut penyesuaian. Yang tetap sama adalah kebutuhan untuk memandang wilayah bukan sebagai ruang kosong yang pasif menerima kebijakan, melainkan sebagai sistem keruangan yang aktif membentuk, sekaligus dibentuk oleh, pilihan lokasi, pola aglomerasi, dan struktur hierarki fungsional di dalamnya. Implikasi kebijakannya jelas: penetapan kawasan sentra produksi unggulan daerah semestinya tidak berhenti pada penunjukan administratif semata, melainkan disertai kajian yang cermat tentang keterkaitan fungsional yang sesungguhnya ingin dibangun, insentif yang tepat untuk mendorong aglomerasi kegiatan pendukung, serta perhatian yang sungguh-sungguh terhadap keterkaitan desa-kota agar manfaat pembangunan wilayah tidak hanya terkonsentrasi di titik pertumbuhannya saja, melainkan benar-benar menjalar ke wilayah-wilayah di sekitarnya, sebagaimana menjadi cita-cita awal dari teori kutub pertumbuhan itu sendiri. Pengalaman praktik perencanaan pembangunan ekonomi lokal di berbagai negara menunjukkan bahwa perencanaan yang berhasil biasanya adalah mereka yang mau berangkat dari potensi dan keterbatasan khas wilayahnya sendiri, dan bukan sekadar meniru resep kawasan lain yang kebetulan pernah berhasil (Blakely & Leigh, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2010). Planning local economic development: Theory and practice (4th ed.). SAGE Publications.
- Christaller, W. (1966). Central places in southern Germany (C. W. Baskin, Trans.). Prentice-Hall. (Karya asli diterbitkan 1933)
- Ding, Y. (2023). The impact of agricultural industrial agglomeration on farmers' income: An influence mechanism test based on a spatial panel model. PLOS ONE, 18(9), e0291188. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291188>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2010). Agro-based clusters in developing countries: Staying competitive in a globalized economy (Agricultural Management, Marketing and Finance Occasional Paper 25). FAO.
- Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. J. (1999). The spatial economy: Cities, regions, and international trade. MIT Press.
- Glasson, J. (1974). An introduction to regional planning: Concepts, theory and practice. Hutchinson.
- Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 99(3), 483–499. <https://doi.org/10.1086/261763>
- Lösch, A. (1954). The economics of location (W. H. Woglom, Trans.). Yale University Press. (Karya asli diterbitkan 1940)
- Marshall, A. (1920). Principles of economics (8th ed.). Macmillan.
- McCann, P. (1995). Rethinking the economics of location and agglomeration. Urban Studies, 32(3), 563–577. <https://doi.org/10.1080/00420989550012979>
- Mustapha, I. K. (2025). Innovation capability in agribusiness clusters: Implications for socioeconomic development in North Central Nigeria. International Journal of Agriculture and Agricultural Technology, 8(1), 21–37.

- Otsuka, K., & Ali, M. (2020). Strategy for the development of agro-based clusters. *World Development Perspectives*, 20, 100257. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100257>
- Perroux, F. (1950). Economic space: Theory and applications. *The Quarterly Journal of Economics*, 64(1), 89–104.
- Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77–90.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi wilayah dan perkotaan*. Rajawali Pers.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi* (Edisi revisi). Bumi Aksara.
- Von Thünen, J. H. (1966). Von Thünen's isolated state (C. M. Wartenberg, Trans.; P. Hall, Ed.). Pergamon Press. (Karya asli diterbitkan 1826)
- Wardhana, D., Ihle, R., & Heijman, W. (2020). Farmer cooperation in agro-clusters: Evidence from Indonesia. *Agribusiness*, 36(4), 725–750. <https://doi.org/10.1002/agr.21637>
- Weber, A. (1929). *Theory of the location of industries* (C. J. Friedrich, Trans.). University of Chicago Press. (Karya asli diterbitkan 1909)

BAB 3

URBANISASI, MIGRASI, DAN DINAMIKA WILAYAH

Urbanisasi dan migrasi merupakan fenomena struktural yang melekat dalam proses pembangunan ekonomi dan transformasi wilayah. Fenomena perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan menjadi dilema yang kompleks dari proses pembangunan. Pada umumnya semakin maju suatu negara yang ditandai dengan semakin tingginya pendapatan per kapita maka semakin banyak penduduknya yang tinggal di daerah perkotaan.

Namun demikian dewasa ini ketika banyak negara -negara yang menjadi lebih urban (*urbanized*) seiring dengan kemajuan pembangunannya, pada saat yang sama negara-negara miskin ternyata juga jauh lebih urban dari negara maju pada saat tingkat pembangunannya setara. Hal ini menunjukkan bahwa urbanisasi bisa terjadi dimana saja, di negara berpendapatan tinggi ataupun rendah di seluruh dunia meskipun pada laju yang berbeda (Todaro dan Smith 2020).

Dalam perspektif ekonomi regional, kedua proses ini tidak sekadar merepresentasikan perpindahan penduduk dari satu lokasi ke lokasi lain, melainkan mencerminkan perubahan mendasar dalam struktur produksi, distribusi tenaga kerja, pola konsumsi, dan organisasi spasial aktivitas ekonomi.

Peningkatan urbanisasi merupakan ciri utama transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor industri dan jasa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, aktivitas produksi cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan karena ketersediaan infrastruktur, pasar tenaga kerja yang lebih luas, jaringan industri, dan kemudahan akses terhadap modal serta teknologi. Migrasi menjadi mekanisme utama yang menggerakkan redistribusi sumber daya manusia dari wilayah

perdesaan menuju pusat-pusat pertumbuhan tersebut (Todaro dan Smith 2020).

Dalam konteks Indonesia, urbanisasi berkembang sangat pesat sejak dekade 1970-an seiring dengan industrialisasi dan ekspansi sektor jasa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa proporsi penduduk perkotaan meningkat dari sekitar 22 persen pada tahun 1980 menjadi lebih dari 57 persen pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 65 persen pada tahun 2035 (BPS 2023). Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi ekonomi, sosial, dan spasial yang kompleks, termasuk pertumbuhan ekonomi yang pesat di kota-kota besar, terbentuknya kawasan metropolitan, serta meningkatnya ketimpangan antarwilayah.

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, teori, dan dinamika urbanisasi dan migrasi dalam kerangka ekonomi regional. Pembahasan meliputi definisi Todaro, konsep *expected utility*, serta implikasi urbanisasi dan migrasi terhadap distribusi penduduk, aglomerasi ekonomi, pertumbuhan wilayah, dan ketimpangan regional. Selain itu, bab ini juga mengaitkan teori dengan realitas empiris Indonesia dan kebijakan pembangunan wilayah nasional.

3.1 Konsep Dasar Urbanisasi dan Migrasi

Peran perkotaan yang semakin penting karena adanya bias urban dan terus meluasnya urbanisasi menyebabkan migrasi desa-kota meningkat pesat, khususnya di kota-kota besar di negara sedang berkembang membuat perlunya kajian tentang faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya fenomena urbanisasi migrasi serta implikasi -implikasinya terhadap wilayah perkotaan yang dituju dan wilayah pedesaan yang ditinggalkan.

3.1.1 Urbanisasi: Definisi dan Karakteristik

Secara demografis, urbanisasi didefinisikan sebagai peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan dengan total penduduk nasional. Proses ini terjadi melalui dua mekanisme utama: pertumbuhan alami

penduduk kota dan migrasi dari desa ke kota (Todaro dan Smith 2020).

Dalam perspektif ekonomi regional, urbanisasi dipahami sebagai proses konsentrasi aktivitas ekonomi, tenaga kerja, dan investasi di wilayah perkotaan, yang pada akhirnya membentuk pusat-pusat pertumbuhan regional. Urbanisasi mencerminkan pergeseran struktur ekonomi dari dominasi sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa, yang secara spasial lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan (McCann 2013).

Karakteristik utama urbanisasi meliputi:

1. Konsentrasi penduduk dan tenaga kerja.
2. Diversifikasi kegiatan ekonomi.
3. Intensifikasi penggunaan lahan.
4. Peningkatan produktivitas dan inovasi.
5. Tekanan terhadap infrastruktur dan lingkungan.

3.1.2 Migrasi: Definisi dan Tipologi

Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan menetap, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang (Lee 1966). Migrasi dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Migrasi internal: perpindahan antarwilayah dalam satu negara.
2. Migrasi internasional: perpindahan antarnegara.
3. Migrasi permanen dan non-permanen.
4. Migrasi sukarela dan migrasi terpaksa.

Dalam ekonomi regional, migrasi internal, khususnya migrasi desa-kota, menjadi fokus utama karena dampaknya yang signifikan terhadap distribusi tenaga kerja, struktur produksi regional, serta dinamika pertumbuhan wilayah (Greenwood 1997).

3.1.3 Teori Migrasi dalam Perspektif Ekonomi Regional

Teori migrasi klasik seperti teori *push -pull* dan *human capital* tetap menjadi dasar dalam analisis ekonomi regional, namun literatur terbaru menunjukkan bahwa kedua teori tersebut telah mengalami perkembangan. Pendekatan *push - full*

kini tidak lagi dipahami secara linear sederhana, melainkan sebagai mekanisme yang bersifat kompleks, asimetris, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan demografis (Liu et al., 2025). Di sisi lain, teori *human capital* tetap relevan sebagai dasar rasionalitas migrasi, tetapi telah diperluas dengan memasukkan peran rumah tangga, ketidakpastian, serta manfaat non-ekonomi dalam pengambilan keputusan migrasi (de Haas).

1. Teori Push-Pull:

Teori push-pull menjelaskan bahwa migrasi dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendorong (*push*) dari daerah asal dan faktor penarik (*pull*) dari daerah tujuan. Faktor pendorong dari daerah asal meliputi kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, produktivitas pertanian yang rendah, serta minimnya akses terhadap layanan publik. Sebaliknya, faktor penarik mencakup upah lebih tinggi, peluang kerja, akses pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas sosial dan hiburan di perkotaan (Lee 1966; Todaro dan Smith 2020). Dalam konteks ekonomi regional teori ini menekankan bahwa ketimpangan antar wilayah menjadi penyebab utama migrasi. Semakin besar kesenjangan antara desa kota, semakin besar pula dorongan migrasi.

Kritik terhadap teori *push-pull* migrasi tidak sekedar ditarik dan didorong, tapi diproses secara kompleks. Faktor yang sama bisa punya dampak yang berbeda di daerah asal dan daerah tujuan. Kritik terhadap teori ini juga mengatakan bahwa teori push-pull terlalu deskriptif (hanya daftar faktor), tidak menjelaskan proses sosial dan interaksi antar faktor, tidak menjelaskan mengapa sebagian orang migrasi, sebagian tidak. Teori ini juga dianggap mengabaikan preferensi dan faktor sosial, terlalu sederhana untuk menjelaskan migrasi modern. Penelitian terbaru menyarankan bahwa push-pull harus dikombinasikan dengan faktor budaya, aspirasi individu, informasi dan ekspektasi, dan jaringan sosial (Liu et al., 2025).

2. Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Dalam pendekatan modal manusia, migrasi dipandang sebagai bentuk investasi individu dalam

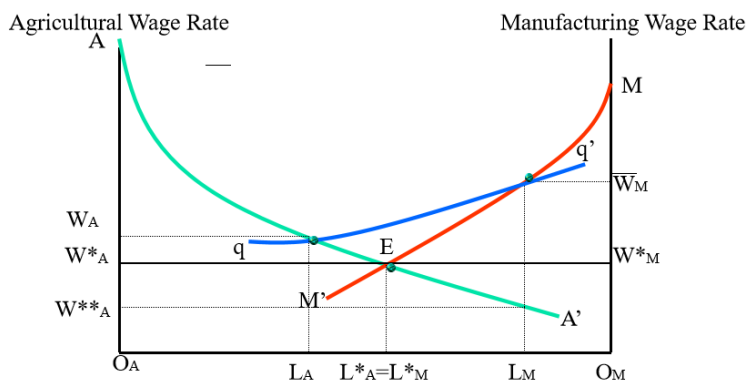
meningkatkan produktivitas dan pendapatan sepanjang siklus hidup. Individu akan bermigrasi jika nilai kini manfaat ekonomi yang diperoleh di wilayah tujuan melebihi biaya migrasi (Sjaastad 1962). Dalam perspektif regional migrasi menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tapi juga menyebabkan *brain drain* di wilayah asal.

Literatur modern masih menegaskan bahwa migrasi adalah bentuk investasi *human capital* individu berpindah untuk memperoleh return ekonomi yang lebih tinggi. Teori modern (*new economics of migration*) memperlus human capital dimana migrasi menjadi keputusan rumah tangga untuk diversifikasi resiko keluarga. Migrasi bukan hanya maksimiliasi pendapatan individu; tidak hanya faktor ekonomi tapi multidimensional return mencakup pendidikan, kualitas hidup, keamanan, peluang sosial; keputusan migrasi bersifat dinamis, dipengaruhi ketidakpastian dan berubah sepanjang hidup (de Haas, 2023).

Jadi Teori Migrasi kontemporer menempatkan migrasi sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan interaksi antara faktor ekonom, sosial, dan kelembagaan. Dalam ekonomi regional, pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami dinamika urbanisasi dan distribusi penduduk.

3. Model Migrasi Harris-Todaro (Harris and Todaro, 1970)

Model Harris-Todaro merupakan kontribusi penting dalam menjelaskan migrasi desa-kota di negara berkembang. Model ini menyatakan bahwa keputusan migrasi tidak ditentukan oleh tingkat upah aktual di kota, melainkan oleh pendapatan harapan (*expected income*), yaitu produk antara tingkat upah formal dan probabilitas memperoleh pekerjaan formal di kota (Todaro dan Smith, 2020).



Gambar 3.1. Model Migrasi Harris- Todaro
Sumber: Todaro dan Smith,2020

Secara matematis:

$$E(W_u) = p \times W_u$$

Migrasi terjadi jika:

$$E(W_u) > W_r$$

Keterangan:

- $E(W_u)$ = expected income di kota
- p = probabilitas mendapatkan pekerjaan
- W_u = Upah di kota
- W_r = Upah di desa

Berdasarkan model Harris-Todaro seperti dalam gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Total angkatan kerja pertanian pedesaan dan industri perkotaan dalam perekonomian adalah sebesar $O_A O$. permintaan tenaga kerja pedesaan ditunjukkan oleh kurva AA' dan permintaan tenaga kerja perkotaan ditunjukkan oleh kurva MM' . Upah equilibrium pasar terjadi bila upah di pertanian pedesaan sama dengan upah di perkotaan ($W_A = W_M$) dengan pembagian tenaga kerja $O_A L_A$ untuk pertanian pedesaan dan $O_M L_M$ untuk tenaga kerja perkotaan.

Namun bila upah ditentukan pemerintah sebesar $\bar{W}_M$, sedangkan upah pasar ada diatas $O_A W_A^*$ maka tenaga kerja sebesar O_{MLM} akan bekerja di sektor industri perkotaan, sedangkan sisanya sebesar O_{ALM} bekerja di pertanian pedesaan dengan tingkat upah $O_A W_A^{**}$ (upah ini lebih kecil dari upah pasar $O_A W_A^*$). Berarti terjadi kesenjangan upah Kota dan Desa sebesar $\bar{W}_M - W_A^{**}$.

Jika para pekerja di pedesaan bebas melakukan migrasi, maka meskipun di desa tersedia lapangan pekerjaan sebanyak O_{MLM} , mereka akan ke kota untuk memburu tingkat upah yang lebih tinggi, kedudukannya diperlihatkan oleh kurva q dimana ,titik pengangguran ada di titik Z , yakni selisih tenaga kerja $O_{MLA} - O_{MLM}$ akan menganggur atau memasuki sektor informal yang berpendapatan rendah.

Berdasarkan model Harris Todaro seperti pada gambar 3.1 di atas, maka implikasi teori tersebut adalah, migrasi tetap terjadi meskipun tingkat pengangguran di kota sudah cukup besar karena selama masih ada kemungkinan untuk meraih penghasilan yang lebih tinggi di kota (nilai sekarang / *present value* dari penghasilan yang diharapkan), maka selaa itupula migrasi akan berjalan terus.

Model ini menjelaskan mengapa migrasi tetap tinggi meskipun tingkat pengangguran di perkotaan besar, karena harapan memperoleh pekerjaan formal dengan upah tinggi tetap menarik bagi migran.

Model ini juga menjelaskan munculnya sektor informal diperkotaan sebagai penampung tenaga kerja

5. *Expected Utility* dan Perluasan Model Harris–Todaro

Michael P. Todaro kemudian memperluas pendekatan pendapatan harapan dengan memasukkan konsep *expected utility*, yang mencakup seluruh manfaat dan biaya migrasi, baik ekonomi maupun non-ekonomi (Todaro dan Smith 2020). Komponen *Expected Utility* terdiri dari :

- a. Manfaat ekonomi: upah lebih tinggi, peluang karier, stabilitas kerja.

- b. Manfaat sosial: pendidikan, layanan kesehatan, jaringan sosial, gaya hidup perkotaan.
- c. Manfaat psikologis: prestise sosial, harapan mobilitas vertikal.
- d. Biaya ekonomi: biaya transportasi, biaya hidup, perumahan.
- e. Biaya sosial dan psikologis: adaptasi budaya, keterasingan sosial, risiko pengangguran.

Pendekatan ini memperkaya pemahaman migrasi sebagai fenomena multidimensional, tidak semata-mata berbasis kalkulasi ekonomi sempit.

3.1.4 Relevansi Teori dalam Ekonomi Regional Modern

Dalam konteks ekonomi regional kontemporer, *expected utility* menjadi semakin relevan karena kualitas hidup, lingkungan, dan akses terhadap layanan publik memainkan peran penting dalam menentukan arah migrasi. Kota-kota dengan kualitas lingkungan baik, layanan pendidikan unggul, dan infrastruktur modern menjadi magnet migrasi baru, meskipun upah tidak selalu paling tinggi (Glaeser 2011).

Sintesis konseptual dari ketiga teori tersebut adalah dalam perspektif ekonomi regional, proses migrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketimpangan wilayah (urban bias, perbedaan upah akan menciptakan faktor push-pull)
2. Individu mengevaluasi manfaat dan biaya (*human capital*) menggunakan konsep present value
3. Keputusan mempertimbangkan ketidakpastian kerja (Harris Todaro) menggunakan *expected income*
4. Terjadi migrasi Desa-kota yang menghasilkan aglomerasi, sektor informal, dan dinamika wilayah

3.2 Keterkaitan Urban Bias dengan Urbanisasi dan Migrasi Desa-Kota

Urban Bias adalah kondisi dimana kebijakan pembangunan lebih menguntungkan wilayah perotaan

dibandingkan wilayah pedesaan, baik dalam bentuk alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi. Konsep ini banyak dikemukakan dalam literatur ekonomi pembangunan untuk menjelaskan mengapa kota lebih cepat berkembang dibanding desa (Todaro dan Smith, 2020).

3.2.1 Urban Bias sebagai penyebab Migrasi Desa-kota

Urban bias merupakan faktor struktural yang mendorong urbanisasi dan migrasi desa-kota melalui penciptaan ketimpangan struktural antarwilayah. Dalam jangka panjang bias ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di perkotaan, namun sekaligus memperlebar ketimpangan wilayah dan menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan. Mekanismenya sebagai berikut:

1. Kebijakan lebih beralih ke kota sehingga investasi, industri, dan layanan publik terkonsentrasi di kota
2. Kesenjangan desa-kota meningkat sehingga upah, peluang kerja, dan kualitas hidup lebih tinggi di kota
3. Muncul *expected income* lebih besar di kota (sesuai model Harris-Todaro)
4. Terjadi migrasi Desa-kota

Dengan demikian urban bias memperkuat faktor penarik (*pull factors*) dalam migrasi (Harris dan Todaro, 1970).

3.2.2 Dampak Urban Bias Terhadap Urbanisasi Dan Migrasi

Urban bias mempercepat urbanisasi melalui: peningkatan arus migrasi ke kota; konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan; dan pertumbuhan kota yang lebih cepat daripada desa. Namun, urbanisasi yang didorong oleh bias kebijakan seringkali bersifat tidak seimbang (*unbalanced urbanization*). Dampak negatif Urban bias berupa terjadinya (World Bank, 2019) :

1. *Over urbanization* dimana kota tumbuh lebih cepat daripada kapasitas ekonominya sehingga pengangguran meningkat dan sektor informal berkembang.

2. *Urban poverty* ,yaitu kondisi dimana migran yang tidak terserap di sektor formal mengalami pendapatan rendah, keterbatasan akses layanan
3. Ketimpangan Wilayah dimana desa tertinggal karena kehilangan investasi dan kehilangan tenaga kerja produktif (*brain drain*)
4. Tekanan Perkotaan berupa kemacetan, pemukiman kumuh, dan degradasi lingkungan

3.2.3 Urban Bias Menurut Perspektif Ekonomi Regional

Berdasarkan perspektif ekonomi regional urban bias:

1. Memperkuat pola wilayah pusat (*core*) dan *periphery* (wilayah pinggiran). Kota sebagai *core*, desa sebagai *periphery*.
2. Mendorong aglomerasi ekonomi di kota, tetapi memperlebar ketimpangan ekonomi desa-kota.
3. Menghambat pemerataan pembangunan spasial (Kanbur dan Venables, 2005).

3.3 Urbanisasi dan Dinamika Wilayah

Dalam ekonomi regional, migrasi merupakan hasil interaksi antara ketimpangan wilayah, (push-pull), keputusan rasional individu (human capital), dan struktur pasar tenaga kerja (Harris-Todaro). ketiga pendekatan ini membentuk kerangka komprehensif dalam menjelaskan urbanisasi dan dinamika wilayah

3.3.1 Redistribusi Penduduk dan Tenaga Kerja

Urbanisasi dan migrasi menyebabkan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan, yang berdampak pada redistribusi tenaga kerja antarwilayah. Proses ini meningkatkan produktivitas melalui spesialisasi dan efisiensi skala, tetapi juga menciptakan ketimpangan antara wilayah inti dan wilayah pinggiran (McCann 2013).

3.3.2 Pembentukan Aglomerasi Ekonomi

Urbanisasi mendorong terbentuknya aglomerasi ekonomi, yaitu pengelompokan aktivitas industri, jasa, dan

perdagangan dalam satu kawasan. Aglomerasi memberikan keuntungan berupa:

1. Efisiensi biaya produksi,
2. Peningkatan inovasi,
3. Akses pasar yang lebih luas,
4. Penyebaran pengetahuan.

Fujita, Krugman, dan Venables (1999) menunjukkan bahwa aglomerasi merupakan kekuatan utama pembentuk struktur spasial ekonomi modern.

3.3.3 Dampak Urbanisasi dan Migrasi Terhadap Wilayah Perkotaan dan Pedesaan

Urbanisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun konsentrasi aktivitas di wilayah tertentu dapat memperlebar ketimpangan antar wilayah. Wilayah yang tertinggal kehilangan sumber daya manusia produktif, sehingga mengalami stagnasi ekonomi (Kanbur dan Venables 2005).

Migrasi bisa memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi daerah yang akan dituju (perkotaan) maupun wilayah asal (pedesaan) yang ditinggalkan. Dampak positif bagi wilayah perkotaan yang menjadi tujuan migrasi berupa peningkatan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan aglomerasi. Sedangkan dampak negatif di wilayah perkotaan berupa meningkatnya pengangguran perkotaan, kemacetan, munculnya permukiman kumuh (**slump**), dan tekanan infrastruktur (World Bank, 2019).

Dampak positif migrasi bagi wilayah pedesaan asal yang ditinggalkan dapat berupa remitansi dan transfer pengetahuan, sedangkan dampak negatifnya berupa brain drain dan penurunan produktivitas (Greenwood, 1997).

3.3.4 Sektor Informal Perkotaan dan urban poverty

Urbanisasi yang cepat menyebabkan sektor formal tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja. Akibatnya, sektor informal berkembang sebagai mekanisme penyesuaian pasar tenaga kerja (Harris and Todaro, 1970). Sektor informal memiliki karakteristik: skala kecil, produktivitas rendah, dan tanpa

jaminan sosial (Hart, 1973). Meskipun berperan sebagai penyerap tenaga kerja, sektor ini juga mencerminkan keterbatasan transformasi ekonomi.

Urbanisasi dan migrasi terjadi karena adanya ketimpangan wilayah perkotaan dan pedesaan. Keterbatasan sektor formal yang ada di perkotaan dalam menampung tenaga kerja yang bermigrasi dari wilayah pedesaan (rural) menyebabkan para imigran menjadi pengangguran sehingga pengangguran perkotaan meningkat. Sebagian orang yang melakukan migrasi dari desa ke kota akan masuk ke sektor informal di perkotaan yang memiliki ciri pendapatannya rendah dan tidak stabil sehingga akan alami kerentanan ekonomi dan terjadinya kemiskinan di perkotaan (*Urban poverty*). Urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan berkembangnya sektor informal dan meningkatkan kemiskinan perkotaan (UN-Habitat, 2020).

3.4 Implikasi Kebijakan

1. Penguatan ekonomi perdesaan untuk menekan migrasi berlebihan.
2. Pengembangan kota menengah sebagai pusat pertumbuhan alternatif.
3. Integrasi kebijakan kependudukan, ketenagakerjaan, dan tata ruang.
4. Pendekatan pembangunan wilayah berbasis klaster dan aglomerasi.

3.5 Kesimpulan

Urbanisasi dan migrasi merupakan motor utama dinamika wilayah dalam pembangunan ekonomi. urban bias merupakan faktor s Model Harris-Todaro dan pendekatan expected utility memberikan kerangka analitis kuat dalam memahami perilaku migrasi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan regional harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan pembangunan.

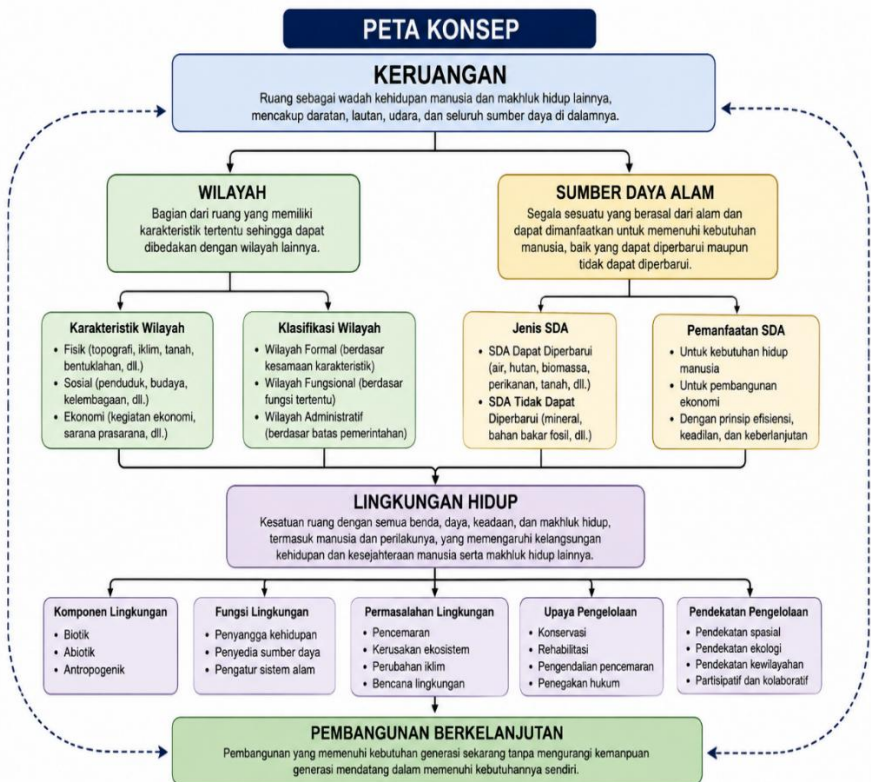
DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- de Haas, H., 2023. *How migration really works: A factful guide to the most divisive issue in politics*. London: Penguin.
- Fujita, M., Krugman, P. & Venables, A. J., 1999. *The spatial economy: Cities, regions, and international trade*. Cambridge: MIT Press.
- Glaeser, E. L., 2011. *Triumph of the city: How our greatest invention makes us richer, smarter, greener, healthier, and happier*. New York: Penguin Press.
- Greenwood, M. J., 1997. Internal migration in developed countries. Dalam: M. R. Rosenzweig & O. Stark, eds. *Handbook of population and family economics*. Vol. 1. Amsterdam: Elsevier, pp. 647–720.
- Harris, J. R. & Todaro, M. P., 1970. Migration, unemployment and development: A two-sector analysis. *The American Economic Review*, 60(1), pp. 126–142.
- Hart, K., 1973. Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), pp. 61–89.
- Kanbur, R. & Venables, A. J. eds., 2005. *Spatial inequality and development*. Oxford: Oxford University Press.
- Krugman, P., 1991. *Geography and trade*. Cambridge: MIT Press.
- Lee, E. S., 1966. A theory of migration. *Demography*, 3(1), pp. 47–57.
- Liu, X., dkk., 2025. *Re-migration decision making: An analysis of push and pull factors*. (Naskah/Jurnal dalam proses publikasi).
- McCann, P., 2013. *Modern urban and regional economics*. edisi ke-2. Oxford: Oxford University Press.
- Sjaastad, L. A., 1962. The costs and returns of human migration. *Journal of Political Economy*, 70(5), pp. 80–93.
- Todaro, M. P. & Smith, S. C., 2020. *Economic development*. edisi ke-13. Harlow: Pearson.

- UN-Habitat, 2020. *World cities report 2020: The value of sustainable urbanization*. Nairobi: United Nations.
- World Bank, 2019. *Indonesia urbanization review: Time to act, realizing Indonesia's urban potential*. Washington DC: World Bank.

BAB 4

KERUANGAN WILAYAH, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP



4.1 Konsep Keruangan Wilayah

4.1.1 Pengertian Ruang

Ruang merupakan unsur utama dalam kajian geografi karena menjadi tempat berlangsungnya seluruh aktivitas manusia maupun proses alam (Bintarto & Hadisumarno, 1979). Dalam perspektif geografi, ruang tidak hanya dipahami sebagai

lokasi secara fisik, tetapi juga sebagai suatu sistem yang mencakup berbagai komponen alam, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang saling berinteraksi (Yunus, 2010).

UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan ruang sebagai suatu kesatuan wilayah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, ruang udara, serta ruang di dalam bumi, yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan manusia dan makhluk hidup lain dalam menjaga kelangsungan hidupnya (UU RI No. 26 Tahun 2007).).

Dalam geografi, ruang memiliki karakteristik yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya sehingga setiap wilayah memiliki potensi, kendala, dan peluang pembangunan yang berbeda (Rustiadi et al., 2021). Perbedaan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh faktor topografi, iklim, geologi, hidrologi, vegetasi, kependudukan, aktivitas ekonomi, serta perkembangan infrastruktur (Tarigan, 2018).

Ruang juga bersifat dinamis karena terus mengalami perubahan sebagai akibat interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia (UNEP, 2024). Perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan kawasan perkotaan, pembangunan infrastruktur, hingga perubahan iklim merupakan contoh proses yang memengaruhi karakteristik ruang dari waktu ke waktu (IPCC, 2023).

4.1.2 Konsep Keruangan

Konsep keruangan (*spatial concept*) merupakan pendekatan utama dalam geografi yang digunakan untuk memahami lokasi, persebaran, pola, serta hubungan antarfenomena di permukaan bumi (Yunus, 2010). Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi pada lokasi tertentu dan bagaimana hubungan fenomena tersebut dengan wilayah lain (Rustiadi et al., 2021).

Secara umum, konsep keruangan terdiri atas beberapa unsur pokok sebagai berikut.

1. Lokasi

Lokasi menunjukkan letak suatu objek atau fenomena di permukaan bumi (Bintarto & Hadisumarno, 1979). Lokasi dibedakan menjadi:

- a. Lokasi absolut, yakni posisi geografis suatu tempat yang dapat diketahui secara pasti melalui koordinat lintang dan bujurnya. (BIG, 2023).
- b. Lokasi relatif, yaitu letak suatu wilayah terhadap wilayah lainnya sehingga dapat berubah sesuai perkembangan jaringan transportasi, ekonomi, maupun sosial (Tarigan, 2018).

Contoh:

Kota Mataram berada pada Pulau Lombok secara relatif, sedangkan secara absolut terletak pada koordinat geografis tertentu (BIG, 2023).

2. Jarak

Jarak merupakan ukuran pemisah antara dua lokasi (Yunus, 2010). Dalam geografi dikenal dua jenis jarak, yaitu:

- a. Jarak absolut, yaitu jarak yang dinyatakan dalam satuan panjang, seperti kilometer atau meter (BIG, 2023).
- b. Jarak relatif, yaitu jarak yang dinilai berdasarkan waktu tempuh, biaya, maupun kemudahan akses (Tarigan, 2018).

Sebagai contoh, dua wilayah dapat memiliki jarak absolut yang sama, tetapi waktu tempuhnya berbeda karena kondisi jalan dan sarana transportasi yang tidak sama (Rustiadi et al., 2021).

3. Keterjangkauan (*Accessibility*)

Keterjangkauan menunjukkan tingkat kemudahan suatu lokasi untuk dicapai dari lokasi lain (Tarigan, 2018). Semakin baik infrastruktur transportasi dan komunikasi, maka semakin tinggi tingkat keterjangkauan suatu wilayah sehingga aktivitas ekonomi dan sosial menjadi lebih berkembang (OECD, 2023).

4. Pola Persebaran

Pola persebaran merupakan susunan atau distribusi suatu fenomena di permukaan bumi (Bintarto & Hadisumarno, 1979). Pola persebaran dapat berupa:

- a. Pola mengelompok (*clustered*);
- b. Pola tersebar (*dispersed*);
- c. Pola memanjang (*linear*);
- d. Pola radial atau melingkar.

Sebagai contoh, permukiman di sepanjang pantai umumnya membentuk pola memanjang mengikuti garis pantai, sedangkan kawasan perdagangan cenderung mengelompok di pusat kota (Yunus, 2010).

5. Interaksi Keruangan

Interaksi keruangan merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dipengaruhi oleh perpindahan manusia, barang, jasa, modal, maupun informasi (Rustiadi et al., 2021). Interaksi tersebut dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi wilayah, kemudahan transportasi, dan kebutuhan antarwilayah (Tarigan, 2018).

6. Diferensiasi Area

Diferensiasi area menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menghasilkan fungsi, potensi, dan permasalahan yang tidak sama (Bintarto & Hadisumarno, 1979). Perbedaan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis wilayah (Rustiadi et al., 2021).

4.1.3 Konsep Wilayah

Wilayah merupakan bagian dari ruang yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dari wilayah lainnya (Tarigan, 2018). Karakteristik tersebut dapat berupa kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, administrasi, maupun fungsi tertentu (Rustiadi et al., 2021).

Konsep wilayah digunakan untuk mempermudah proses analisis, perencanaan, dan pengelolaan pembangunan karena setiap wilayah memiliki potensi dan permasalahan yang berbeda (Yunus, 2010). Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan tidak dapat disamaratakan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah (OECD, 2023).

4.1.4 Klasifikasi Wilayah

Wilayah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya.

1. Wilayah Formal (*Formal Region*)

Wilayah formal merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu, seperti iklim, jenis tanah, topografi, penggunaan lahan, atau budaya (Tarigan, 2018).

Contoh:

- a. Kawasan hutan hujan tropis di Kalimantan.
- b. Wilayah sentra produksi padi di Pulau Jawa.

2. Wilayah Fungsional (*Functional Region*)

Wilayah fungsional terbentuk karena adanya hubungan atau fungsi tertentu antarwilayah sehingga membentuk suatu sistem yang saling bergantung (Rustiadi et al., 2021).

Contoh:

- a. Kawasan metropolitan Jabodetabek.
- b. Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok beserta daerah hinterland-nya.

3. Wilayah Administratif

Wilayah administratif merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan batas pemerintahan untuk memudahkan penyelenggaraan administrasi negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014).

Contoh:

- a. Provinsi.
- b. Kabupaten.
- c. Kota.
- d. Kecamatan.
- e. Desa atau Kelurahan.

4.1.5 Interaksi Antarwilayah

Interaksi antarwilayah merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang menghasilkan perpindahan penduduk, barang, jasa, modal, maupun informasi (Rustiadi et al., 2021). Interaksi ini muncul karena setiap wilayah memiliki keunggulan dan keterbatasan yang berbeda sehingga saling melengkapi (Tarigan, 2018).

Faktor-faktor yang memengaruhi interaksi antarwilayah meliputi:

1. Perbedaan potensi sumber daya alam.
2. Jumlah dan karakteristik penduduk.
3. Kemajuan teknologi transportasi.
4. Infrastruktur komunikasi.
5. Kebijakan pemerintah.
6. Tingkat perkembangan ekonomi.

Interaksi antarwilayah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan investasi, serta distribusi barang dan jasa (OECD, 2023).

4.1.6 Analisis Keruangan dalam Pembangunan

Analisis keruangan merupakan proses mengidentifikasi pola persebaran suatu fenomena serta hubungan antarfenomena berdasarkan lokasi dan karakteristik wilayah (Yunus, 2010). Analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan karena mampu menunjukkan wilayah yang memiliki potensi, hambatan, maupun kebutuhan pembangunan secara lebih akurat (Rustiadi et al., 2021).

Dalam praktiknya, analisis keruangan banyak memanfaatkan **Sistem Informasi Geografis (SIG)**, penginderaan jauh, dan data statistik untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang, seperti penataan ruang, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan lingkungan hidup (BIG, 2023).

4.1.7 Contoh Penerapan Konsep Keruangan dan Wilayah di Indonesia

Konsep keruangan dan wilayah diterapkan dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional, salah satunya melalui penyusunan **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)** yang mengatur pemanfaatan ruang secara efektif, efisien, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007).

Pembangunan **Ibu Kota Nusantara (IKN)** juga merupakan contoh penerapan analisis keruangan, yaitu dengan mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan, risiko bencana, konektivitas, serta pemerataan pembangunan antarwilayah (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pengembangan **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika** menunjukkan penerapan konsep wilayah fungsional melalui integrasi sektor pariwisata, transportasi, permukiman, dan ekonomi lokal untuk mendorong pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan (ITDC, 2023).

4.2 Sumber Daya Alam

4.2.1 Pengertian Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (SDA) merupakan seluruh unsur yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan (Arsyad, 2010). Sumber daya alam mencakup komponen biotik maupun abiotik yang memiliki nilai guna, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi kehidupan manusia (Soerianegara & Indrawan, 2014).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk sistem penyangga kehidupan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009).

Keberadaan sumber daya alam menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena menyediakan bahan baku, energi, pangan, air, serta berbagai kebutuhan lainnya yang menunjang kehidupan masyarakat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2024). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (World Commission on Environment and Development, 1987).

4.2.2 Klasifikasi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan asal, sifat, potensi pemanfaatan, dan tingkat ketersediaannya.

1. Berdasarkan Asalnya

a. Sumber Daya Alam Hayati (Biotik)

Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia (FAO, 2022).

Contoh sumber daya alam hayati meliputi:

- 1) Hutan
- 2) Ikan
- 3) Ternak
- 4) Tanaman pangan
- 5) Tanaman perkebunan
- 6) Satwa liar

Sumber daya hayati memiliki kemampuan untuk berkembang biak sehingga dapat diperbarui apabila dikelola secara berkelanjutan (KLHK, 2024).

b. Sumber Daya Alam Nonhayati (Abiotik)

Yang dimaksud dengan sumber daya alam nonhayati yaitu sumber daya yang berasal dari komponen abiotik (benda tak hidup), yang terbentuk akibat proses geologis atau proses alam lainnya (Tarigan, 2018).

Contohnya meliputi:

- 1) Air
- 2) Tanah
- 3) Batu bara
- 4) Minyak bumi
- 5) Gas alam
- 6) Emas
- 7) Nikel
- 8) Tembaga

Oleh karena sebagian besar sumber daya abiotik terbentuk dalam kurun waktu yang sangat panjang, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan efisiensi serta keberlanjutannya. (USGS, 2023).

2. Berdasarkan Kemampuan Memperbarui Diri

a. Sumber Daya Alam yang Dapat Diperbarui (*Renewable Resources*)

Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang mampu pulih kembali melalui proses alami dalam waktu relatif singkat apabila pemanfaatannya tidak melebihi kemampuan regenerasinya (FAO, 2022).

Contoh:

- 1) Air
- 2) Hutan
- 3) Perikanan
- 4) Biomassa
- 5) Energi surya
- 6) Energi angin
- 7) Energi panas bumi

Meskipun dapat diperbarui, sumber daya tersebut tetap dapat mengalami kerusakan apabila dieksploitasi secara berlebihan (UNEP, 2024).

b. Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbarui (*Non-Renewable Resources*)

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya yang pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun sehingga jumlahnya terbatas dan akan habis apabila terus dieksploitasi (USGS, 2023).

Contohnya meliputi:

- 1) Minyak bumi
- 2) Batu bara
- 3) Gas alam

- 4) Uranium
- 5) Timah
- 6) Bauksit
- 7) Nikel

Pemanfaatan sumber daya ini perlu dilakukan secara efisien dengan tetap mengembangkan energi alternatif sebagai penggantinya (International Energy Agency [IEA], 2023).

3. Berdasarkan Kegunaannya

Berdasarkan kegunaannya, sumber daya alam dibedakan menjadi:

- a. **Sumber daya materi**, yaitu sumber daya yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, seperti kayu, pasir, batu kapur, dan bijih logam (Tarigan, 2018).
- b. **Sumber daya energi**, yaitu sumber daya yang digunakan sebagai penghasil energi, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, tenaga air, tenaga angin, dan panas bumi (IEA, 2023).
- c. **Sumber daya ruang**, yakni ruang yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan berbagai aktivitas, mencakup permukiman, kegiatan industri, pertanian, hingga kawasan konservasi (UU RI No. 26 Tahun 2007).

4.2.3 Potensi Sumber Daya Alam Indonesia

Indonesia merupakan negara megabiodiversitas yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan beragam sehingga menjadi salah satu modal utama pembangunan nasional (FAO, 2022).

1. Sumber Daya Kehutanan

Indonesia memiliki kawasan hutan tropis yang termasuk terbesar di dunia dan berfungsi sebagai penyedia hasil hutan, penyimpan karbon, pengatur tata air, serta habitat berbagai flora dan fauna endemik (KLHK, 2024).

Hasil hutan tidak hanya berupa kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu seperti rotan, damar, madu, getah, bambu, dan

tanaman obat yang memiliki nilai ekonomi tinggi (FAO, 2022).

2. Sumber Daya Pertanian

Kondisi iklim tropis dan tanah yang subur menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi padi, jagung, kedelai, hortikultura, serta berbagai komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, teh, dan karet (Kementerian Pertanian, 2024).

Sektor pertanian juga berperan penting dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan (BPS, 2024).

3. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratannya sehingga menyimpan potensi perikanan tangkap, budidaya, wisata bahari, energi laut, serta keanekaragaman hayati yang tinggi (Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], 2024).

Pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional melalui konsep ekonomi biru (*blue economy*) (KKP, 2024).

4. Sumber Daya Pertambangan

Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas mineral dunia, seperti nikel, timah, tembaga, emas, dan bauksit (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [KESDM], 2024).

Komoditas tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung industri nasional maupun kebutuhan pasar global, terutama untuk pengembangan kendaraan listrik dan energi terbarukan (IEA, 2023).

4.2.4 Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional (Arsyad, 2010).

Beberapa bentuk pemanfaatan sumber daya alam antara lain:

1. Sebagai sumber pangan

Lahan pertanian, perikanan, dan peternakan menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional (Kementerian Pertanian, 2024).

2. Sebagai sumber energi

Minyak bumi, gas alam, batu bara, panas bumi, tenaga air, dan energi surya dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk rumah tangga, industri, maupun transportasi (IEA, 2023).

3. Sebagai bahan baku industri

Berbagai hasil pertanian, kehutanan, dan pertambangan menjadi bahan baku utama dalam industri manufaktur, konstruksi, farmasi, dan teknologi (KESDM, 2024).

4. Sebagai sumber devisa negara

Komoditas mineral, hasil hutan, serta produk perikanan memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor (BPS, 2024).

4.2.5 Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Meningkatnya kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam telah menimbulkan berbagai permasalahan yang mengancam keberlanjutan lingkungan (UNEP, 2024).

Beberapa permasalahan utama meliputi:

1. Eksploitasi Berlebihan

Pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya tersebut (KLHK, 2024).

2. Deforestasi

Alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, maupun permukiman mengakibatkan berkurangnya tutupan hutan serta meningkatnya risiko banjir dan longsor (FAO, 2022).

3. Pencemaran Lingkungan

Aktivitas industri, pertambangan, pertanian, dan rumah tangga menghasilkan limbah yang dapat mencemari air, tanah, dan udara sehingga mengganggu kesehatan manusia serta ekosistem (UNEP, 2024).

4. Penurunan Keanekaragaman Hayati

Perusakan habitat dan eksploitasi satwa liar menyebabkan banyak spesies mengalami penurunan populasi bahkan terancam punah (IUCN, 2024).

5. Konflik Pemanfaatan Ruang

Persaingan penggunaan lahan antara sektor pertanian, industri, pertambangan, konservasi, dan permukiman sering menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan (Rustiadi et al., 2021).

4.2.6 Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

Menurut World Commission on Environment and Development (1987), pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan merujuk pada strategi pemanfaatan kekayaan alam secara maksimal, namun tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan agar ketersediaan sumber daya tersebut dapat terus dipertahankan hingga masa depan. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan meliputi:

1. **Efisiensi**, yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara hemat dan optimal (OECD, 2023).
2. **Konservasi**, yaitu menjaga kelestarian ekosistem serta keanekaragaman hayati melalui perlindungan kawasan dan rehabilitasi lingkungan (KLHK, 2024).
3. **Keadilan**, yaitu memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat (United Nations, 2015).
4. **Partisipasi masyarakat**, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam (UNDP, 2023).
5. **Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan**, Menurut UNEP (2024), berarti mengadopsi berbagai bentuk inovasi yang mampu mengoptimalkan efisiensi pemakaian sumber daya alam, sekaligus mengurangi efek merugikan terhadap kelestarian lingkungan.).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi,

kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

4.3 Lingkungan Hidup

4.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan memengaruhi kelangsungan hidup, kesejahteraan, serta perkembangan organisme, termasuk manusia (Soemarwoto, 2001). Dalam perspektif ekologi, lingkungan hidup dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan alam (Odum & Barrett, 2005).

UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang beserta seluruh unsur di dalamnya—baik benda, energi, kondisi, maupun makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya—yang secara bersama-sama berdampak pada alam, keberlanjutan kehidupan, dan tingkat kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009).

Keberadaan lingkungan hidup sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan karena berfungsi sebagai penyedia utama berbagai kebutuhan dasar manusia, mulai dari air, udara, tanah, pangan, energi, sampai bahan baku industri (United Nations Environment Programme [UNEP], 2024). Hal ini menjadikan kondisi lingkungan sebagai faktor penentu utama bagi kualitas hidup manusia dan keberlanjutan proses pembangunan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2024)

1. Komponen Biotik

Menurut Odum & Barrett (2005), lingkungan hidup terdiri atas beragam komponen yang saling memengaruhi dan berinteraksi sehingga menciptakan suatu sistem kehidupan yang dinamis. Ketiga kelompok komponen tersebut menjadi klasifikasi utama yang biasa digunakan untuk memahami struktur lingkungan hidup secara umum

Komponen biotik merupakan seluruh makhluk hidup yang terdapat dalam suatu lingkungan dan memiliki hubungan timbal balik satu sama lain (Campbell et al., 2021). Komponen biotik terdiri atas:

a. Produsen

Produsen merupakan organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, seperti tumbuhan hijau dan fitoplankton (Campbell et al., 2021).

b. Konsumen

Konsumen merupakan organisme yang memperoleh energi dengan memanfaatkan organisme lain sebagai sumber makanan, seperti manusia, hewan herbivora, karnivora, dan omnivora (Odum & Barrett, 2005).

c. Dekomposer

Dekomposer merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan, seperti bakteri dan jamur (Campbell et al., 2021).

2. Komponen Abiotik

Komponen abiotik merupakan unsur-unsur fisik dan kimia yang tidak hidup tetapi sangat memengaruhi kehidupan organisme (Soemarwoto, 2001).

Komponen tersebut meliputi:

- a. Air
- b. Udara
- c. Tanah
- d. Cahaya matahari
- e. Suhu
- f. Kelembapan
- g. Curah hujan
- h. Angin
- i. Mineral
- j. Topografi

Setiap komponen abiotik memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kehidupan makhluk hidup sehingga menentukan karakteristik suatu ekosistem (Odum & Barrett, 2005).

3. Komponen Sosial Budaya

Selain komponen biotik dan abiotik, lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh komponen sosial budaya yang berasal dari aktivitas manusia (Soemarwoto, 2001).

Komponen sosial budaya meliputi:

- a. Jumlah penduduk.
- b. Tingkat pendidikan.
- c. Nilai dan budaya masyarakat.
- d. Kegiatan ekonomi.
- e. Teknologi.
- f. Kebijakan pemerintah.
- g. Kelembagaan sosial.

Komponen sosial budaya berperan penting dalam menentukan pola pemanfaatan sumber daya alam serta kualitas lingkungan hidup suatu wilayah (UNDP, 2023).

4.3.3 Ekosistem, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan

1. Pengertian Ekosistem

Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya sehingga membentuk hubungan yang saling bergantung dan berkesinambungan (Odum & Barrett, 2005).

Dalam suatu ekosistem terjadi aliran energi, siklus materi, serta interaksi antarorganisme yang menjaga keseimbangan lingkungan (Campbell et al., 2021).

Contoh ekosistem meliputi:

- a. Hutan tropis
- b. Mangrove
- c. Danau
- d. Sungai
- e. Laut
- f. Sawah
- g. Padang rumput
- h. Terumbu karang

2. Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, serta keseimbangan ekosistem tanpa mengalami kerusakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009).

Daya dukung dipengaruhi oleh:

- a. Ketersediaan lahan.
- b. Ketersediaan air.
- c. Kualitas tanah.
- d. Ketersediaan energi.
- e. Kondisi iklim.
- f. Keanekaragaman hayati.
- g. Jumlah penduduk.

Pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi batas daya dukung lingkungan akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, sekaligus berkurangnya kapasitas alam untuk terus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan bagi kehidupan (KLHK, 2024).

3. Daya Tampung Lingkungan

Daya tampung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan hidup dalam menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009).

Sebagai contoh, sungai memiliki kemampuan alami untuk menguraikan limbah organik. Akan tetapi, apabila jumlah limbah yang dibuang melebihi daya tampungnya, maka kualitas air akan menurun dan menyebabkan pencemaran (UNEP, 2024).

4.3.4 Permasalahan Lingkungan Hidup

Perkembangan jumlah penduduk, urbanisasi, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam telah meningkatkan tekanan terhadap lingkungan hidup sehingga

memunculkan berbagai permasalahan lingkungan baik pada skala lokal maupun global (IPCC, 2023).

1. Pencemaran Lingkungan

UU RI Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai peristiwa masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lainnya ke dalam suatu lingkungan, yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup hingga lingkungan tersebut tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara semestinya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009).

Berdasarkan media yang tercemar, pencemaran dibedakan menjadi:

a. Pencemaran Air

Pencemaran air umumnya disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah pertambangan yang masuk ke badan air sehingga menurunkan kualitas air dan mengganggu kehidupan organisme akuatik (UNEP, 2024).

b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran hutan, pembangkit listrik, dan pembakaran sampah yang menghasilkan berbagai polutan seperti karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NO_x), dan partikel halus (PM_{2.5}) (World Health Organization [WHO], 2024).

c. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah terjadi akibat akumulasi limbah berbahaya, pestisida, pupuk kimia, logam berat, maupun sampah yang mengurangi kesuburan tanah serta membahayakan kesehatan manusia (UNEP, 2024).

2. Deforestasi

Deforestasi merupakan berkurangnya luas kawasan hutan akibat alih fungsi lahan, pengebangan liar, kebakaran hutan, maupun pembangunan infrastruktur (FAO, 2022).

Dampak deforestasi antara lain:

- a. Hilangnya habitat satwa liar.

- b. Penurunan keanekaragaman hayati.
- c. Meningkatnya risiko banjir dan longsor.
- d. Berkurangnya cadangan karbon.
- e. Meningkatnya emisi gas rumah kaca.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah pergeseran pola iklim yang berlangsung dalam kurun waktu panjang, yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat berbagai aktivitas manusia (IPCC, 2023).

Dampak perubahan iklim meliputi:

- a. Kenaikan suhu global.
- b. Perubahan pola musim.
- c. Meningkatnya kejadian cuaca ekstrem.
- d. Kekeringan.
- e. Banjir.
- f. Kenaikan muka air laut.
- g. Penurunan produktivitas pertanian.

Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang membentang panjang, Indonesia tergolong rentan terhadap dampak perubahan iklim, terlebih dengan kondisi masyarakatnya yang masih banyak bergantung pada sektor pertanian dan perikanan (Bappenas, 2025).

4. Penurunan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan variasi makhluk hidup yang terdapat di suatu wilayah, baik pada tingkat genetik, spesies, maupun ekosistem (Convention on Biological Diversity, 1992).

Eksplorasi sumber daya alam, kerusakan habitat, perubahan iklim, serta masuknya spesies invasif menjadi penyebab utama menurunnya keanekaragaman hayati di berbagai wilayah dunia (IUCN, 2024).

5. Pengelolaan Sampah

Peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap tahun (KLHK, 2024).

Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menyebabkan:

- a. Pencemaran tanah.
- b. Pencemaran air.
- c. Pencemaran udara.
- d. Penyumbatan saluran drainase.
- e. Banjir.
- f. Gangguan kesehatan masyarakat.

Penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (UNEP, 2024).

4.3.5 Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya sistematis untuk menjaga fungsi lingkungan hidup agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009).

Beberapa upaya pelestarian lingkungan meliputi:

1. Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan konservasi mencakup pelestarian kawasan-kawasan lindung, antara lain taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa, serta penerapan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (KLHK, 2024).

2. Rehabilitasi Lingkungan

Rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan melalui kegiatan reboisasi, reklamasi lahan bekas tambang, restorasi gambut, dan rehabilitasi daerah aliran sungai (KLHK, 2024).

3. Pengendalian Pencemaran

Pengendalian pencemaran dilakukan melalui pengolahan limbah, penerapan teknologi bersih, pengawasan kualitas lingkungan, dan penegakan hukum terhadap pelaku

pencemaran (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009).

4. Pendidikan Lingkungan

Pendidikan lingkungan hadir sebagai sarana untuk memperluas wawasan, membangun kesadaran, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, yang dapat ditempuh melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal (UNESCO, 2020).

5. Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program pelestarian lingkungan (UNDP, 2023).

4.3.6 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri (World Commission on Environment and Development, 1987).

Konsep ini menekankan keseimbangan antara tiga pilar utama pembangunan, yaitu:

- 1. Aspek ekonomi**, yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara efisien dan berdaya saing (OECD, 2023).
- 2. Aspek sosial**, yang menekankan pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan (United Nations Development Programme [UNDP], 2023).
- 3. Aspek lingkungan**, yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam, perlindungan ekosistem, serta pengurangan pencemaran dan emisi gas rumah kaca (UNEP, 2024).

Implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia diwujudkan melalui berbagai kebijakan, antara lain penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL), pengembangan energi baru dan terbarukan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Bappenas, 2025).

4.4 Studi Kasus Di Indonesia

4.4.1 Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Tata Guna Lahan di Indonesia

Alih fungsi lahan merupakan perubahan penggunaan lahan dari fungsi awalnya menjadi fungsi lain sebagai akibat meningkatnya kebutuhan ruang untuk permukiman, industri, perdagangan, infrastruktur, maupun aktivitas ekonomi lainnya (Lambin et al., 2003). Di Indonesia, alih fungsi lahan terjadi secara luas terutama pada kawasan pertanian produktif, hutan, dan daerah pesisir yang mengalami tekanan akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2023).

Perubahan tata guna lahan memberikan dampak positif berupa meningkatnya aktivitas ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur (Tarigan, 2018). Namun, perubahan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti berkurangnya luas lahan pertanian, meningkatnya risiko banjir, penurunan daerah resapan air, hilangnya habitat satwa liar, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup (KLHK, 2024).

Salah satu contoh nyata terjadi di kawasan perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar yang mengalami perkembangan wilayah secara pesat sehingga mengurangi ruang terbuka hijau dan meningkatkan kawasan terbangun (BPS, 2024). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya suhu permukaan, kemacetan, pencemaran udara, serta menurunnya daya dukung lingkungan perkotaan (UNEP, 2024).

Untuk mengendalikan alih fungsi lahan, pemerintah menerapkan kebijakan penataan ruang melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta perlindungan terhadap lahan pertanian

pangan berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007).

4.4.2 Deforestasi dan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Menurut FAO (2022), Indonesia termasuk negara pemilik kawasan hutan tropis terbesar di dunia, yang memiliki fungsi vital sebagai penyimpan karbon, pengatur tata air, pelindung keanekaragaman hayati, dan penyangga kehidupan masyarakat. Akan tetapi, KLHK (2024) mencatat bahwa dalam beberapa dekade terakhir, kawasan hutan tersebut mengalami berbagai tekanan yang diakibatkan oleh penebangan liar, kebakaran hutan, pembukaan lahan perkebunan, kegiatan pertambangan, serta pembangunan infrastruktur.).

Deforestasi mengakibatkan berbagai dampak, antara lain meningkatnya emisi gas rumah kaca, hilangnya habitat flora dan fauna, berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta terganggunya siklus hidrologi (IPCC, 2023).

Sebagai contoh, kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatra dan Kalimantan pada beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kabut asap lintas batas, penurunan kualitas udara, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerugian ekonomi yang besar (UNEP, 2024).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan laju deforestasi, antara lain melalui moratorium izin pembukaan hutan primer dan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, restorasi gambut, serta peningkatan pengawasan terhadap pembalakan liar (KLHK, 2024).

4.4.3 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang mencapai sekitar dua pertiga dari total wilayah nasional sehingga memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar (Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], 2024).

Potensi tersebut meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove,

wisata bahari, energi laut, serta jasa lingkungan pesisir (FAO, 2022).

Meskipun demikian, sektor kelautan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), penangkapan ikan ilegal (*illegal, unreported, and unregulated fishing*), pencemaran laut akibat sampah plastik, kerusakan terumbu karang, serta degradasi ekosistem mangrove (UNEP, 2024).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan **Ekonomi Biru (*Blue Economy*)**, pengembangan kawasan konservasi laut, rehabilitasi mangrove, pengawasan perikanan berbasis teknologi, serta penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan nasional (KKP, 2024).

4.4.4 Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Sektor pertambangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan bahan baku industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan penerimaan negara, serta pengembangan wilayah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [KESDM], 2024).

Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas mineral dunia, seperti nikel, tembaga, emas, timah, dan bauksit yang memiliki peran strategis dalam industri global, terutama industri kendaraan listrik dan energi terbarukan (*International Energy Agency* [IEA], 2023).

Di sisi lain, aktivitas pertambangan dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik, seperti perubahan bentang alam, pencemaran air, pencemaran udara, penurunan kualitas tanah, hilangnya vegetasi, serta konflik sosial dengan masyarakat sekitar (UNEP, 2024).

Sebagai contoh, kegiatan pertambangan terbuka tanpa reklamasi dapat meningkatkan risiko erosi, sedimentasi sungai, banjir, dan kerusakan habitat satwa liar (KLHK, 2024).

Oleh karena itu, setiap kegiatan pertambangan diwajibkan memenuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), melakukan reklamasi pascatambang, serta menerapkan prinsip pertambangan yang baik (*good mining*

practice) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020).

4.4.5 Perubahan Iklim dan Bencana Lingkungan di Indonesia

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan berkelanjutan karena memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk pertanian, perikanan, kesehatan, energi, dan infrastruktur (IPCC, 2023).

Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim karena memiliki garis pantai yang panjang, wilayah kepulauan, serta sebagian besar penduduk bermukim di wilayah pesisir (Bappenas, 2025).

Beberapa dampak perubahan iklim yang telah dirasakan di Indonesia antara lain:

1. Meningkatnya frekuensi banjir;
2. Meningkatnya kejadian tanah longsor;
3. Kekeringan pada musim kemarau;
4. Abrasi pantai;
5. Kenaikan muka air laut;
6. Kebakaran hutan dan lahan;
7. Perubahan musim tanam pertanian.

Selain perubahan iklim, Indonesia juga merupakan negara yang rawan terhadap berbagai bencana geologi, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan likuefaksi karena berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], 2024).

Upaya adaptasi dan mitigasi dilakukan melalui penguatan sistem peringatan dini, rehabilitasi ekosistem pesisir, pembangunan infrastruktur tahan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengurangan emisi gas rumah kaca (IPCC, 2023).

4.4.6 Studi Kasus Pengelolaan Wilayah Berkelanjutan di Indonesia

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika merupakan salah satu contoh pengembangan wilayah berbasis pariwisata yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kawasan pembangunan (*Indonesia Tourism Development Corporation [ITDC], 2024*).

Pengembangan kawasan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan investasi, serta mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (Bappenas, 2025).

Dalam pelaksanaannya, pengembangan KEK Mandalika juga memperhatikan aspek keberlanjutan melalui pengelolaan kawasan hijau, pengolahan limbah, konservasi pesisir, penyediaan ruang terbuka hijau, serta pemberdayaan masyarakat lokal (ITDC, 2024).

Meskipun demikian, pengembangan kawasan wisata tetap menghadapi tantangan berupa peningkatan volume sampah, kebutuhan air bersih, tekanan terhadap kawasan pesisir, serta perubahan sosial ekonomi masyarakat yang memerlukan pengelolaan secara berkelanjutan (KLHK, 2024).

2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu contoh penerapan konsep keruangan dan pembangunan wilayah yang mempertimbangkan aspek pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan terhadap bencana (Bappenas, 2025).

Konsep **Forest City** yang diterapkan dalam pembangunan IKN bertujuan mempertahankan tutupan vegetasi, meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi emisi karbon, serta mendukung pembangunan kota yang ramah lingkungan (Otorita Ibu Kota Nusantara, 2024).

Keberhasilan pembangunan IKN sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan tata ruang, konservasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan (Bappenas, 2025).

4.5 Penutup

4.5.1 Rangkuman

Keruangan merupakan konsep dasar dalam geografi yang menjelaskan bagaimana lokasi, jarak, pola persebaran, keterjangkauan, dan interaksi antarfenomena membentuk karakteristik suatu wilayah (Yunus, 2010). Melalui pendekatan keruangan, berbagai fenomena alam maupun sosial dapat dianalisis secara sistematis sehingga memberikan dasar yang kuat dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan (Rustiadi et al., 2021).

Wilayah merupakan bagian dari ruang yang memiliki karakteristik tertentu, baik berdasarkan aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya, maupun administrasi (Tarigan, 2018). Setiap wilayah memiliki potensi, keunggulan, serta permasalahan yang berbeda sehingga memerlukan strategi pengelolaan dan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi lokal (Bintarto & Hadisumarno, 1979).

Sumber daya alam merupakan modal utama pembangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, energi, air, bahan baku industri, dan jasa lingkungan (Arsyad, 2010). Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, namun pemanfaatannya harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik pemanfaatan ruang (FAO, 2022).

Lingkungan hidup merupakan sistem yang tersusun atas komponen biotik, abiotik, dan sosial budaya yang saling berinteraksi dalam menjaga keseimbangan kehidupan (Soemarwoto, 2001). Keseimbangan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumber daya (daya dukung) serta kemampuannya dalam menerima beban

pencemaran (daya tampung) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009).

Berbagai aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, deforestasi, dan emisi gas rumah kaca telah meningkatkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup serta memperbesar risiko terjadinya bencana ekologis dan perubahan iklim (IPCC, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap proses pembangunan (United Nations, 2015).

Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan agar kebutuhan generasi saat ini dapat dipenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri (World Commission on Environment and Development, 1987). Penerapan konsep tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan (UNDP, 2023).

4.5.2 Refleksi Pembelajaran

Setelah mempelajari seluruh materi dalam buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa setiap aktivitas manusia memiliki konsekuensi terhadap kondisi ruang, wilayah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup (Yunus, 2010). Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas hidup manusia (KLHK, 2024).

Mahasiswa juga diharapkan memiliki kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (United Nations, 2015). Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui perilaku yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya

secara efisien, serta kepatuhan terhadap berbagai peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup (UNEP, 2024).

4.5.3 Kesimpulan

Yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa keruangan, wilayah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup adalah konsep-konsep yang saling terkait erat serta tidak dapat dilepaskan satu sama lain dalam kajian geografi maupun pembangunan (Rustiadi et al., 2021). Ciri khas ruang dan wilayah turut menentukan persebaran sumber daya alam, pola perilaku aktivitas manusia, serta dinamika pembangunan di masing-masing daerah (Tarigan, 2018).

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan membuka peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, asalkan pemanfaatannya dilakukan secara optimal (BPS, 2024). Namun demikian, pengelolaan yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi lingkungan, di antaranya pencemaran, deforestasi, degradasi lahan, kepunahan keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim (IPCC, 2023).

Oleh karena itu, pengelolaan ruang, wilayah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang (World Commission on Environment and Development, 1987). Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga kelestarian sumber daya alam sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (UNDP, 2023).

4.5.4 Rekomendasi

Berdasarkan materi yang telah dipelajari, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan dalam mendukung pengelolaan ruang, wilayah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan penataan ruang agar pemanfaatan lahan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007).

2. Pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan prinsip konservasi, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan serta penguatan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam (KLHK, 2024).
3. Peningkatan pendidikan dan literasi lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup (UNESCO, 2020).
4. Dunia usaha diharapkan menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan melalui efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, penerapan ekonomi sirkular, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (OECD, 2023).
5. Perguruan tinggi perlu meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penyelesaian berbagai permasalahan keruangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup sehingga menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional (UNDP, 2023).

4.5.5 Penutup

Pembahasan **Keruangan Wilayah, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup** disusun sebagai bahan pembelajaran untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep-konsep dasar geografi yang berkaitan dengan ruang, wilayah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pemahaman tersebut diharapkan mampu membekali mahasiswa tidak sekadar dengan penguasaan konsep teoritis, tetapi juga dengan kemampuan analitis untuk mengidentifikasi berbagai tantangan pembangunan sekaligus merumuskan solusi alternatif yang berorientasi pada keberlanjutan.

Perubahan lingkungan yang terjadi sebagai akibat perkembangan penduduk, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kebutuhan terhadap sumber daya alam menuntut adanya paradigma pembangunan yang lebih bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan (IPCC, 2023). Oleh karena itu, setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha,

akademisi, maupun masyarakat, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Akhirnya, diharapkan buku ajar ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran serta mendorong mahasiswa untuk terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian terhadap pengelolaan ruang, wilayah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, S. (2010). *Konservasi tanah dan air* (Ed. ke-2). IPB Press.
- Badan Informasi Geospasial. (2023). *Indonesia geospatial outlook 2023*. Badan Informasi Geospasial.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Data informasi bencana Indonesia*. <https://bnpb.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Laporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Indonesia 2025*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bintarto, R. (1987). *Geografi kota*. Ghalia Indonesia.
- Bintarto, R., & Hadisumarno, S. (1979). *Metode analisa geografi*. LP3ES.
- Campbell, N. A., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., & Orr, R. B. (2021). *Campbell biology* (12th ed.). Pearson.
- Convention on Biological Diversity. (1992). *Convention on Biological Diversity*. United Nations.
- Food and Agriculture Organization. (2022). *The state of the world's forests 2022: Forest pathways for green recovery and building inclusive, resilient and sustainable economies*. FAO.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. IPCC.
- Indonesia Tourism Development Corporation. (2024). *Laporan keberlanjutan kawasan ekonomi khusus Mandalika*. ITDC.
- International Energy Agency. (2023). *World energy outlook 2023*. IEA.
- International Union for Conservation of Nature. (2024). *The IUCN Red List of Threatened Species*. <https://www.iucnredlist.org>

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Pedoman penyelenggaraan penataan ruang*. ATR/BPN.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Handbook of energy and economic statistics of Indonesia 2024*. Kementerian ESDM.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). *Laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024*. KKP.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Status lingkungan hidup Indonesia 2024*. KLHK.
- Kementerian Pertanian. (2024). *Statistik pertanian 2024*. Kementerian Pertanian.
- Lambin, E. F., Geist, H. J., & Lepers, E. (2003). Dynamics of land-use and land-cover change in tropical regions. *Annual Review of Environment and Resources*, 28, 205–241. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.28.050302.105459>
- Odum, E. P., & Barrett, G. W. (2005). *Fundamentals of ecology* (5th ed.). Thomson Brooks/Cole.
- OECD. (2023). *OECD regional outlook 2023: The long-standing geography of inequalities*. OECD Publishing.
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2024). *Konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara*. Otorita IKN.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2021). *Perencanaan dan pengembangan wilayah* (Edisi revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soemarwoto, O. (2001). *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan* (Ed. revisi). Djambatan.
- Soerianegara, I., & Indrawan, A. (2014). *Ekologi hutan Indonesia*. Laboratorium Ekologi Hutan, Fakultas Kehutanan IPB.
- Tarigan, R. (2018). *Perencanaan pembangunan wilayah* (Edisi revisi). Bumi Aksara.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- United Nations. (2024). *World population prospects 2024*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.

- United Nations Development Programme. (2023). *Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock*. UNDP.
- United Nations Environment Programme. (2024). *Global environment outlook*. UNEP.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020). *Education for sustainable development: A roadmap*. UNESCO.
- United States Geological Survey. (2023). *Mineral commodity summaries 2023*. U.S. Geological Survey.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2020). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- World Health Organization. (2024). *Ambient air pollution*. World Health Organization.
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*. Pustaka Pelajar.

BIODATA PENULIS



Dr. Iwan Harsono, S.E., M.Ec.

Associate Professor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram

Penulis merupakan *Associate Professor* pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram yang dikenal luas sebagai pakar ekonomi regional dan pembangunan daerah di Indonesia. Kepakarannya berfokus pada ekonomi regional, ketimpangan wilayah, perencanaan pembangunan berbasis spasial, serta analisis kebijakan publik yang berorientasi pada penguatan daya saing daerah.

Dengan pengalaman akademik lebih dari tiga dekade, penulis telah mengabdikan diri sebagai dosen sejak tahun 1988. Pendidikan magister ditempuh pada *University of New England, Australia* dalam bidang *Agricultural and Resource Economics*, serta meraih gelar doktor dalam bidang *Economics and Development Studies*. Kombinasi pendidikan internasional dan pengalaman empiris menjadikan penulis memiliki perspektif komprehensif dalam menjembatani teori ekonomi dengan praktik pembangunan wilayah.

Sebagai ahli ekonomi regional, penulis memiliki rekam jejak strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah. Penulis pernah menjabat sebagai Direktur Utama/Wakil Ketua Badan Pengelola KAPET Bima (2009–2012), di mana Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat secara *ex officio* bertindak sebagai Ketua. KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu)

Bima sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima, dan merupakan salah satu dari 13 KAPET di Indonesia yang tersebar di 13 provinsi untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi regional, sehingga peran penulis berada dalam kerangka kebijakan strategis nasional dalam percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, penulis aktif dalam berbagai lembaga penting seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB, Dewan Riset Daerah (DRD) NTB, tenaga ahli DPRD, serta tim seleksi pejabat tinggi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Peran ini menegaskan posisinya sebagai ekonom yang tidak hanya konseptual, tetapi juga berpengaruh langsung dalam praktik kebijakan publik.

Dalam dunia akademik, penulis mengampu berbagai mata kuliah strategis seperti Ekonomi Regional, Ekonomi Pembangunan, Ekonometrika, Statistik Ekonomi, hingga Kebijakan Publik. Selain itu, sejak menjadi dosen, penulis telah menghasilkan 27 buku ajar dan buku referensi ber-ISBN, yang menjadi rujukan penting dalam kajian ekonomi pembangunan dan ekonomi kewilayahan di Indonesia.

Di tingkat publik, penulis dikenal sebagai intelektual yang sangat aktif menulis di media nasional dan internasional. Pemikiran dan analisisnya secara konsisten hadir dalam berbagai media massa, termasuk artikel opini di surat kabar nasional berbahasa Inggris *The Jakarta Post*. Salah satu tulisannya yang terbaru berjudul *"A Call for a Phased Approach to Fiscal Decentralization"* yang diterbitkan pada 19 September 2025, mengangkat isu strategis terkait desentralisasi fiskal, dengan menekankan bahwa penurunan belanja pemerintah berpotensi menekan daya beli serta meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Artikel tersebut dapat diakses melalui:

<https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/09/20/a-call-for-a-phased-approach-to-fiscal-decentralization.html>

Saat ini, penulis juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Penulis dan Peneliti Indonesia (APEPINDO) Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Ketua Insan Doktor Ilmu Ekonomi (IDEI)

Provinsi NTB. Dengan kombinasi kekuatan akademik, pengalaman kebijakan, serta produktivitas intelektual yang tinggi, penulis merupakan salah satu figur penting dalam pengembangan pemikiran dan praktik ekonomiMregional di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui Email: iwanharsono@unram.ac.id dan Website: <https://iwanharsono.com>.

BIODATA PENULIS



Unang Atmaja,Ir., M.Sc.

Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi

Penulis lahir di Kota Tasikmalaya. Ia meraih gelar sarjana di bidang Pertanian dari Universitas Padjadjaran Bandung kemudian melanjutkan pendidikan di Agriculture Development Universiteit Gent, Belgium. Beberapa Short Course di Wageningen University and Research-WUR The Netherland. Sejak berkarir sebagai Dosen di Program Studi Agribisnis, Universitas Siliwangi 1996 penulis aktif dalam penelitian dan pengembangan di bidang Agribisnis, dengan fokus utama Pembangunan Agribisnis, dan mengajar berberapa mata kuliah diantaranya Ekonomi Makro, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan dan Perencanaan Wilayah Pertanian, Penulis memiliki sejumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terkemuka dan telah menjadi pembicara pada berbagai konferensi internasional di bidang Pembangunan Pertanian.

BIODATA PENULIS



Banatul Hayati SE.MSi

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnisa Universitas Diponegoro

Penulis lahir di Cirebon tanggal 16 Maret 1968. Penulis adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan melanjutkan studi S2 pada program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP. Penulis menekuni penelitian bidang ekonomi makro dan ekonomi Pembangunan.

BIODATA PENULIS



Dr. Dra. Emi Salmah, M.Si.:

Dr. Dra. Emi Salmah, M.Si.: Lahir di Dompu, Nusa Tenggara Barat, 20 Maret 1963. Menempuh jenjang pendidikan SDN 2 Dompu, SMPN 1 Dompu, SMAN 1 Dompu, tamat tahun 1982. Kuliah S1 pada Fakultas Ekonom Universitas Mataram, tamat Tahun 1987, S2 di Universitas Hasanuddin tamat tahun 1997, konsentrasi Ekonomi Perencanaan Wilayah dan S3 di Universitas Airlangga tahun 2025, konsentrasi Ilmu Ekonomi. Sejak tahun 1988 sampai sekarang bertugas sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, mengampu mata kuliah, Ekonomi Pembangunan 1&2, Ekonomi Perencanaan 1&2, Ekonomi Publik, Perekonomian Indonesia, Ekonomi Internasional, Ekonomi Regional. Selain itu mengajar pada S2 prodi Magister Ilmu Ekonomi, mengampu Mata kuliah Ekonomi Perencanaan Madya, Ekonomi Pembangunan Madya, Ekonomi Regional Madya dan Ekonomi Keuangan Publik Madya. Selain mengajar di S1 & S2 juga mengajar pada Program Diploma (D3) Perpajakan dan D3 Akuntansi, mengampu mata kuliah Pengantar Perpajakan, Pajak penghasilan orang pribadi / Badan. Penulis menjadi sekretaris Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Mataram dan menjadi anggota Asosiasi Studi Gender dan Anak Indonesia (ASWGI). Penulis aktif mengikuti seminar nasional dan Internasional dan aktif menulis pada jurnal nasional / internasional, terkait masalah Ekonomi Pembangunan, Ekonomi perencanaan, masalah anak dan perempuan. Buku yang pernah

ditulis secara bersama dan sudah dipublikasikan antara lain: Pengantar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Pengantar Perpajakan dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce.